



Volume 2, Nomor 1 : Maret 2023

PUBLIC SPHERE REVIEW

Journal of Public Administration

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya
2023



PUBLIC SPHERE REVIEW
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Public Sphere Review merupakan jurnal yang Terbit dua kali dalam satu tahun pada Bulan Maret dan September. Jurnal ini dikelola oleh Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah yang memiliki fokus dan ruang lingkup di bidang urusan publik, seperti: Manajemen pelayanan publik, Administrasi pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, Kebijakan publik, Manajemen sumber daya manusia sektor publik, Komunikasi publik, dan Kebijakan pendidikan.

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya

EDITORIAL TEAM

Editor in chief

Wildan Taufik Raharja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

IT & Website Support

Moh. Musleh
Moh. Faizal Amin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Diterbitkan oleh

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya

Alamat Redaksi

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya
Gedung Pulau Bras Lantai 1
Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya – 60111

Website

<https://psr.hangtuah.ac.id>

Editor in board:

M. Husni Tamrin
Universitas Hang Tuah, Indonesia

Ali Roziqin
Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Lunariana Lubis
Universitas Hang Tuah, Indonesia

Fierda Nurany
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Dida Rahmadanik
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Agie Nugroho Soegiono
Universitas Airlangga, Indonesia

Reviewer:

Asih Widi Lestari
Universitas Tribhuwana Tunggal, Indonesia

Lailul Mursyidah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wahyu Eko Pujiyanto
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

Falih Suaedi
Universitas Airlangga, Indonesia

Anggraeny Puspaningtyas
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Indra Pratama Putra Salmon
Universitas Terbuka, Indonesia

Daftar Isi
Public Sphere Review Vol. 2 No. 1: Maret 20223

1	<i>Servant Leadership Model: Studi Kasus pada Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Timur</i>	
	Agni Shanti Mayangsari, Wahyu Eko Pujiyanto.....	1
2	Penerapan Sapta Pesona Potensi Desa Wisata Petik Jambu di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo	
	Astrid Eka Wahyu Cahya Megananda, Hasan Ismail.....	13
3	Pola Komunikasi Organisasi Ketua Tim Sepakbola City Of Heroes Surabaya untuk Mengkoordinasi Anggota dalam Organisasi	
	Tri Prasetijowati, Fierda Nurany, Muhammad Novi Julia Resa.....	22
4	Pengelolaan Aset Wisata Telaga Soda dalam Peningkatan PADes di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan	
	Mudhiatul Lailiyah, Deasy Arieffiani.....	32
5	Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kota Surabaya	
	Aprilliana Rahmani, Mas Roro Lilik Ekowanti.....	43
6	Peran Bank Sampah sebagai Lembaga Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	
	Bunga Dwima Sarry, Sasmito Jati Utama	52



Servant Leadership Model: Studi Kasus pada Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Timur

*Agni Shanti Mayangsari*¹, *Wahyu Eko Pujiyanto*²

¹Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, Universitas Airlangga, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.49>

CORRESPONDENCE

E-mail: wahyueko.mnj@unusida.ac.id

KEYWORDS

Leadeships Model, Servant Leadership, Dinas Kependudukan, Jawa Timur

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the servant leadership model that is applied in the work environment of the East Java Provincial Population Service. A qualitative case study design was chosen for this study. The reason for considering case studies is that servant leadership is a single concept to be explored as a process. Three types of qualitative data collection were carried out: in-depth interviews, open interviews, direct observation, and written documents. Based on the results described above, it can be concluded that the servant leadership that is applied to East Java dispenduk refers to the concept of Spears (2004) which adheres to 10 principles of leadership namely, 1) community building, (2) persuasion and (3) stewardship, (4)) listening, (5) empathy, (6) healing, (7) awareness, (8) commitment to the growth of people, (9) foresight and (10) conceptualization. Servant leadership illustrates the belief that organizational goals will be achieved in the long term only by first facilitating the growth, development, and general well-being of the individuals who make up the organization. Therefore, servant leadership is a leadership style that must be embraced by today's organizations to increase employee loyalty, commitment, and performance.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang mencapai 200 juta jiwa, pendataan penduduk di Indonesia sangat penting untuk menjaga keteraturan tata kelola negara. Mulai dari pendataan kelahiran, pembuatan kartu identitas, hingga pencatatan kematian perlu dilakukan demi menjaga hak-hak warga negara. Dinas Kependudukan merupakan lembaga negara yang berkewajiban melaksanakan tugas tersebut. Sebagai salah satu organisasi sektor publik, Dispenduk menghadapi tekanan luar biasa untuk memberikan layanan berkualitas dan meningkatkan efisiensi. Pada era digital saat ini, tekanan tersebut makin berlipat karena masyarakat semakin kritis dan sangat mudah mengakses informasi (Sururi, 2019). Masyarakat yang makin teredukasi dan dengan mudah mengetahui apa-apa

yang menjadi haknya, memiliki ekspektasi pelayanan yang lebih tinggi dari era sebelumnya. Namun kenyataannya kualitas layanan di organisasi sektor publik mengalami kesulitan dalam pengukuran hasil, bahkan pengawasan lebih besar dari publik dan pers. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang yang mengatur hak masyarakat/ pengguna pelayanan publik, salah satunya adalah masyarakat berhak untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 35 ayat (3) huruf a. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan (ombudsman.go.id).

Organisasi sektor publik memproduksi jasa, jadi yang dialami oleh pelanggannya adalah *experience*. Organisasi yang mampu mentransformasi serangkaian pengalaman pelanggan menjadi hubungan yang terkoneksi dengan mereka adalah kunci untuk bisa menciptakan keunggulan kompetitif (Aryanti & Prasajo, 2021). Kualitas layanan di sektor publik juga dinilai lambat dan hal ini makin diperburuk dengan kurangnya kebebasan untuk bertindak dan persyaratan keputusan harus didasarkan pada hukum (Andhika, 2020; Ridwan, 2019). Karenanya pemimpin di organisasi sektor publik harus membantu pegawai mereka agar mampu menghadapi tekanan luar biasa untuk beradaptasi dengan perubahan signifikan yang terjadi di lingkungan eksternal (Daft, 2014).

Kepemimpinan merupakan tentang prinsip. Lima prinsip kepemimpinan panduan adalah pengambilan keputusan, orang, strategi, produktivitas, dan peningkatan diri. Model servant leadership telah berevolusi, dimulai dengan teori sifat (1950-an-1960-an), teori perilaku (tahun 1970-an), dan kepemimpinan transaksional (Bass, 1981, 2008) dan meluas ke kepemimpinan transformasional Burns (1978) hingga kepemimpinan transformasional yang populer di tahun 1980-an atau servant leadership yang muncul saat ini (Dinh et al., 2014; Wren, 2013). Kepemimpinan transaksional dapat berperan dalam mempromosikan pengadopsian sasaran kinerja oleh pengikut (Northouse, 2021).

Dalam pembahasan kepemimpinan, tidaklah biasa bagi para pemimpin untuk digambarkan sebagai para *wielder* kekuasaan, sebagai individu yang mendominasi orang lain. Dalam hal ini, kekuasaan dikonseptualisasikan sebagai alat yang digunakan para pemimpin untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Bertentangan dengan pandangan kekuasaan ini, Burns menekankan kekuasaan dari sudut pandang hubungan. Bagi Burns, kekuasaan bukanlah entitas yang digunakan para pemimpin atas orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri; sebaliknya, kekuasaan terjadi dalam hubungan. Ini harus digunakan oleh para pemimpin dan pengikut untuk mempromosikan tujuan kolektif mereka (Pendleton & King, 2002).

Meskipun tidak ada teori eksplisit dalam literatur penelitian tentang kekuasaan dan kepemimpinan, kekuasaan adalah konsep yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan. Adalah umum bagi orang untuk melihat pemimpin (baik dan buruk) dan orang-orang dalam posisi kepemimpinan sebagai individu yang memegang kekuasaan atas orang lain, dan sebagai hasilnya, kekuasaan sering dianggap identik dengan kepemimpinan. Selain itu, orang sering tertarik dengan bagaimana pemimpin menggunakan kekuatan mereka. Mempelajari bagaimana para pemimpin terkenal, seperti Hitler atau Aleksander Agung, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi perubahan pada orang lain (Lambert, 2003).

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dapat diartikan pula sebagai seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga ia memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu (Northouse, 2021). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela demi mencapai tujuan organisasi.

Fokus kepemimpinan transaksional adalah pada masalah ketenagakerjaan, upah dan gaji, tinjauan kinerja, dan insentif kinerja. Kepemimpinan transaksional dapat berperan penting dalam mempromosikan pengadopsian sasaran kinerja oleh pengikut. Kepemimpinan transformasional, di sisi lain, adalah gaya kepemimpinan yang relasional dan menginspirasi; pemimpin transformasional menginspirasi pengikut untuk mencapai kinerja yang luar biasa dengan meningkatkan kesadaran dan tingkat kesadaran mereka tentang pentingnya tujuan organisasi (Gill, 2011). Pemimpin mendorong pengikut menuju transendensi diri untuk kepentingan tim dan organisasi. Pada gilirannya, pengikut menjadi termotivasi untuk fokus pada kebutuhan mereka yang lebih tinggi. Kepemimpinan transaksional dan transformasional memiliki kepentingan yang sama dalam mendorong pegawai untuk menghasilkan ide-ide yang memajukan organisasi. *Servant leadership* adalah kepemimpinan yang berorientasi pada orang lain, peduli, dan menginspirasi (Dierendonck, 2011). Dengan melayani orang lain, pemimpin yang melayani melampaui kepentingan pribadi individu. Layanan adalah salah satu faktor pembeda servant leadership. Kinerja yang lebih tinggi dan keterlibatan pegawai oleh pemimpin organisasi mendorong pengikut untuk mengejar tujuan karir mereka dan memenuhi tanggung jawab kerja yang penting, dan pendekatan ini menekankan nilai membangun dan memberi kembali kepada masyarakat (Greenleaf, 2002; Russell, 2001).

Di era modern, istilah servant leadership pertama kali dikemukakan oleh Robert K. Greenleaf (1970) di buku yang berjudul "The Servant as Leader". Greenleaf mendapatkan ide servant leadership setelah terinspirasi sebuah novel dari penulis Jerman yang berjudul *The Journey to The East*. Novel ini menceritakan seorang karakter utama yang bernama Leo yang bertindak seperti seorang pelayan dan bekerja bersama sekelompok orang. Hingga suatu saat Leo menghilang dan semua orang menyadari bahwa Leo bukanlah pelayan melainkan pemimpin. Dia membantu semua orang dan mendorong potensi yang terbaik dari masing-masing orang (Greenleaf, 2002; Patterson, 2003).

Dari inspirasi ini, Greenleaf menyimpulkan bahwa seorang Servant Leader harus mempunyai dorongan yang besar untuk melayani dari dalam dirinya. Artinya, servant leader adalah pemimpin yang mengutamakan pelayanan atau mau untuk melayani pegawainya dan karena pilihannya untuk melayani, maka membuatnya ingin menjadi seorang pemimpin (Russell, 2001; Sendjaya & Sarros, 2002). Jika digambarkan dalam sebuah piramid, maka pada struktur organisasi kepemimpinan Servant Leader berada di bagian paling bawah, sedangkan yang paling utama adalah para pegawai (Rafsanjani, 2017; Russell & Stone, 2002).

Greenleaf, R. K. (2002), menggambarkan servant leadership sebagai kepemimpinan yang melayani utamanya dan mendorong hubungan yang baik dengan mengembangkan atmosfer dignity (martabat) dan respect (hormat), membangun komunitas dan kerja tim, dan mendengarkan rekan dan pegawai. Pada perspektif praktis, Servant Leader tidak hanya berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan organisasi mereka, tetapi juga memanfaatkan orientasi layanan untuk memotivasi orang lain dan mencapai tujuan mereka (Russell & Stone, 2002; Stone et al., 2004). Gaya kepemimpinan servant leadership bertujuan untuk menekankan adanya peningkatan terhadap pelayanan kepada orang lain, menciptakan rasa kekeluargaan serta peningkatan rasa berbagi yang tinggi dalam suatu organisasi (Spears & Lawrence, 2002).

Servant leadership memiliki aspek kepemimpinan transaksional dan transformasional, karena model kepemimpinan ini dibangun secara hierarkis, satu terintegrasi dengan yang lain. Servant leadership adalah salah satu model kepemimpinan yang memiliki komponen spiritual dan etika. Spiritualitas adalah pendahulu etika (Fry et al., 2005). Studi ini membahas kesenjangan dalam literatur tentang kurangnya etika kepemimpinan dan etika bisnis dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin senior dalam organisasi. Studi ini penting dalam menawarkan pemahaman yang lebih besar tentang pengalaman hidup para pemimpin senior dalam organisasi *servant leadership* dan menutup kesenjangan dalam literatur (Lesminadi & Hardjono, 2021).

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Timur berhasil menempati level 4 atau level terbaik berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri periode triwulan 1 tahun 2022. Berdasarkan evaluasi tersebut, tercatat hanya empat Disdukcapil provinsi di Indonesia yang meraih penilaian kinerja level 4 atau level terbaik, yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur. Hasil kinerja ini dapat menjadi indikasi bahwa kepemimpinan di lingkungan Dispenduk Jatim telah menerapkan kepemimpinan kontemporer yang bersesuaian dengan tuntutan masyarakat yakni servant leadership. Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menguraikan servant leadership model yang diterapkan di lingkungan kerja Dispenduk Jatim. Oleh karena itulah dilakukan penelitian dengan mengangkat judul "Servant Leadership Model: Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Timur"

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif karena fokusnya adalah pada fenomena yang terjadi di lingkungan alami, dunia nyata, yang ingin diselidiki dengan segala kerumitannya (Leedy & Ormrod, 2014). Tiga jenis pengumpulan data kualitatif yang dilakukan adalah wawancara mendalam, wawancara terbuka, observasi langsung, dan dokumen tertulis. Patton (2014) mencatat bahwa studi kualitatif bervariasi berdasarkan jenis, tujuan, dan kualitas. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif tepat karena melayani tujuan deskriptif, di mana saya menggunakan pertanyaan wawancara terbuka yang dapat mengungkap sifat servant leadership dalam pengaturan organisasi serta proses, hubungan, dan individu yang terlibat. Dengan cara ini, penelitian kualitatif dapat mengisi kesenjangan

dalam literatur. Desain studi kasus kualitatif menjadi pilihan untuk penelitian ini. Alasan untuk mempertimbangkan studi kasus adalah bahwa servant leadership adalah konsep tunggal untuk dijelajahi sebagai suatu proses. Tujuan pendekatan studi kasus adalah untuk memahami suatu persoalan dengan menggali satu atau lebih kasus dalam suatu sistem yang terikat (setting atau konteks), yang dapat berupa objek kajian dan produk penyelidikan. Fokusnya adalah pada pengembangan deskripsi dan analisis yang mendalam dari satu kasus atau beberapa kasus untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah penelitian (Patton, 2014; Schwandt, 2015). Masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini cocok untuk desain studi kasus karena berkaitan dengan pengalaman hidup para pemimpin senior yang mempraktekkan servant leadership di lingkungan Dispenduk Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai studi tentang *servant leadership* memberikan dampak yang berkesinambungan dalam organisasi. Servant leadership membangun rasa percaya, adil, kerjasama, dan budaya saling menolong yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas individu dan organisasi yang lebih tinggi. Ketika seorang pemimpin telah melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk terhubung dengan orang-orangnya secara positif, seseorang dapat melihat hasil positif dalam cara organisasi berfungsi. Pentingnya hubungan positif ini di tempat kerja menjadikannya penting bagi para pemimpin untuk menjadi cerdas secara emosional dan terlibat secara emosional, terutama karena kepemimpinan adalah fenomena yang memicu emosi. Yukl et.al (2013) mengklaim bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah proses manajemen emosi dimana pemimpin mengelola emosi mereka sendiri dan pengikut mereka. Salah satu anggapan bahwa kecerdasan emosional pemimpin mempengaruhi aspek mikro dari gaya kepemimpinan, seperti preferensi untuk berbagai cara menggabungkan perilaku pemimpin tertentu. Untuk sepenuhnya memahami manfaat dari model kepemimpinan pelayan yang asertif yang diusulkan ini, seseorang harus memahami, emosi berbeda dari suasana hati dalam hal kekhususan, intensitas, dan durasinya. Dibandingkan dengan suasana hati, emosi lebih mungkin dikaitkan dengan kejadian tertentu, lebih mungkin dikaitkan dengan respons tertentu, lebih intens, menargetkan perilaku seseorang, dan durasinya lebih pendek (Yukl et al., 2013).

Sinek (2014) mendalilkan bahwa pemimpin kontemporer dapat belajar beradaptasi dengan kebiasaan budaya dan tradisi pengikutnya untuk mendapatkan kepercayaan, rasa hormat, dan penerimaan mereka sambil membangun lingkaran keamanan. Meskipun inti dari pesan pemimpin mungkin tidak berubah, pesan tersebut dapat disampaikan secara berbeda untuk setiap individu (Northouse, 2021; Russell & Stone, 2002; Sendjaya et al., 2008). Pemimpin dapat menampilkan apa yang disebut Zweifel (2003) sebagai “kewarganegaraan global”, atau orang yang menghormati budaya dan adat istiadat berbagai orang sambil tetap terbuka untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Para pemimpin kontemporer dapat mengumpulkan kelompok yang kolaboratif dan beragam yang berbagi rasa hormat dan makna. Filosofi kepemimpinan pelayan yang tegas ini, dan pengembangan selanjutnya dari lingkaran keselamatan, dapat diterapkan pada prosedur operasi organisasi atau standar etika

dengan maksud untuk membawa perasaan memiliki organisasi, nilai-nilai organisasi bersama dan rasa empati organisasi yang mendalam, sementara secara dramatis meningkatkan kepercayaan, kerja sama, dan pemecahan masalah (Daft, 2014; Greenleaf, 2002).

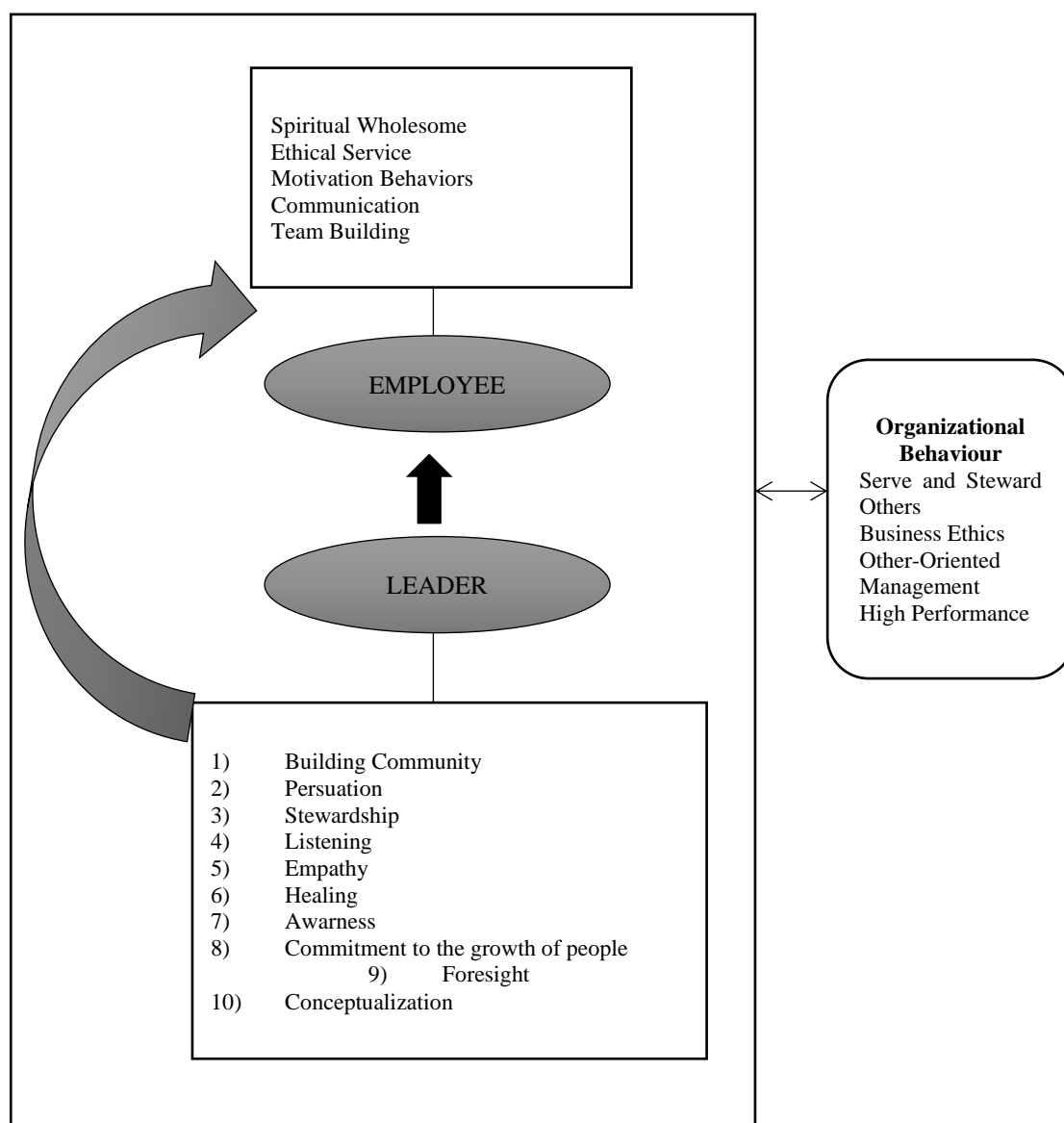
Spears (2005) melanjutkan penelitian Greenleaf dan menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek yang harus dilakukan sebagai pemimpin melayani, yang dikenal sebagai 10 karakteristik *Servant Leader*, sebagai berikut: 1) *Listening*: pemimpin perlu banyak mendengar para anggota timnya untuk bisa memahami apa yang menjadi aspirasi mereka. Pemimpin juga harus mau bertanya agar pada proses *listening* mendapatkan banyak data yang bisa dihadirkan bahan evaluasi diri dan evaluasi kinerja. 2) *Empathy*: pemimpin harus bisa memahami kondisi yang sedang dirasakan oleh anggota timnya dan tidak pelit memberikan kata-kata pendukung untuk mereka. 3) *Healing*: pemimpin harus piawai mengatasi permasalahan emosional yang sedang dihadapi oleh diri sendiri agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan emosional yang dihadapi oleh anggota timnya. 4) *Awareness*: pemimpin harus peka menangkap hal-hal penting yang muncul di sekitar lingkungannya agar bisa dijadikan dasar untuk mempengaruhi anggota timnya dan pada akhirnya digunakan untuk mencapai tujuan bersama tim dan organisasi. 5) *Persuasion*: pemimpin harus bisa mempengaruhi anggotanya sehingga mereka percaya dengan kepemimpinannya dan percaya dengan keputusan yang diambil. Alih-alih menggunakan wewenangnya untuk memaksa anggota tim menyetujui keputusannya, pemimpin dengan karakteristik *servant leadership* memiliki kemampuan untuk meyakinkan anggota timnya terkait keputusan yang diambilnya. 6) *Conceptualization*: pemimpin harus mampu menggabungkan antara konsep yang rumit dan aplikasi praktis sehari-hari sehingga tujuan organisasi bisa mudah dicapai. 7) *Foresight*: pemimpin harus bisa mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi masa depan dengan bersumber pada pelajaran dari masa lalu dan masa kini. 8) *Stewardship*: pemimpin harus menumbuhkan rasa saling percaya dalam tim yang dilandasi etika sehingga anggota tim memiliki komitmen yang tinggi tanpa merasa dikendalikan atau diawasi, namun karena dilayani. 9) *Commitment to the growth of people*: pemimpin harus mampu melihat potensi positif setiap anggotanya agar tepat pada saat mendesain program pengembangan masing-masing orang sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. 10) *Building community*: pemimpin harus mampu membangun kebersamaan antar anggota timnya, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling terbuka untuk bekerjasama.

Terdapat 5 faktor *Servant Leadership* yaitu: *altruistic calling*, *emotional healing*, *wisdom*, *persuasive mapping*, dan *organizational stewardship*. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Spears, 2002, 2005):

- 1) *Altruistic calling* adalah membantu orang lain tanpa pamrih dengan melibatkan pengorbanan pribadi walaupun tidak ada keuntungan bagi dirinya. Indikatornya yaitu:
 - a. Pemimpin yang mengutamakan orang lain terlebih dahulu.
 - b. Pemimpin yang melakukan segalanya untuk melayani.
 - c. Pemimpin yang mengorbankan keinginan pribadinya untuk orang lain.
 - d. Pemimpin melampaui panggilan tugas untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

- 2) *Emotional Healing* adalah mampu menyemangati pegawai yang sudah putus asa dan juga bagi yang menderita luka emosional sehingga membuat pegawai utuh kembali dan bersemangat. Indikatornya yaitu:
 - a. Pemimpin akan ditemui pengikutnya ketika mengalami trauma pribadi.
 - b. Pemimpin membantu pengikutnya mengatasi masalah emosionalnya.
 - c. Pemimpin membantu pengikutnya pulih dari permasalahan emosional.
 - d. Pemimpin mampu membantu pengikutnya mengatasi rasa sakit hati.
- 3) *Wisdom* adalah melampaui wawasan dan melakukan sesuatu secara proaktif serta mengarahkan tindakan-tindakan yang akan terjadi dan mengantisipasi konsekuensi. Indikatornya yaitu:
 - a. Pemimpin yang waspada dengan apa yang terjadi.
 - b. Pemimpin yang pandai mengantisipasi konsekuensi dari keputusan.
 - c. Pemimpin yang memiliki kesadaran tinggi tentang apa yang sedang terjadi.
 - d. Pemimpin yang mengetahui apa yang terjadi.
 - e. Pemimpin yang tahu apa yang akan terjadi.
- 4) *Persuasive Mapping* adalah efektif dalam membangun kepercayaan dalam organisasi sehingga bisa meyakinkan anggota tim daripada memaksakan kepatuhan. Indikatornya yaitu:
 - a. Pemimpin menawarkan alasan kuat agar pengikutnya melakukan sesuatu.
 - b. Pemimpin mendorong para pengikutnya memiliki impian besar.
 - c. Pemimpin yang sangat persuasif.
 - d. Pemimpin yang pandai meyakinkan pengikutnya untuk melakukan sesuatu.
 - e. Pemimpin yang berbakat membujuk pengikutnya.
- 5) *Organizational Stewardship* adalah memiliki sikap percaya kepada anggota tim dan memiliki keterbukaan dan persuasi daripada mengontrol pegawainya. Indikatornya yaitu:
 - a. Pemimpin yang berkeyakinan organisasi perlu memainkan peran moral dalam masyarakat.
 - b. Pemimpin berkeyakinan bahwa organisasi perlu berfungsi sebagai komunitas.
 - c. Pemimpin melihat potensi organisasi untuk berkontribusi pada masyarakat.
 - d. Pemimpin mendorong pengikutnya memiliki semangat komunitas.
 - e. Pemimpin mempersiapkan organisasi membuat perubahan positif di masa depan.

Berdasarkan hasil observasi, Pimpinan Dispenduk Jatim memiliki gaya kepemimpinan yang mengarah pada *servant leadership style* atau gaya kepemimpinan melayani yang mana tindakan yang dilakukan pimpinan memenuhi berbagai aspek yang harus dilakukan sebagai pemimpin yang melayani berdasarkan teori dari Spears (Gambar 1).



Gambar 1. Servant Leadership Model Pada Dispenduk Jatim

Sumber: Diolah Penulis, 2022

Pimpinan Dispenduk Jatim telah memenuhi aspek (1) *building community* dengan cara senantiasa mengingatkan dan menyelaraskan visi misi lembaga kepada para pegawai serta membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pegawai termasuk mengomunikasikan pembangunan zona integritas. Komunikasi dan hubungan yang baik akan melancarkan berbagai hal dan berdampak positif, misalnya saja masukan, saran, dan motivasi dari pimpinan kepada seluruh pegawainya akan lebih didengar dan dijalankan tanpa beban. Pada akhirnya hal tersebut akan meumbuhkan rasa percaya pegawai terhadap pimpinan. Tindakan-tindakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mengarahkan pada aspek (2) *persuasion* dan (3) *stewardship*, yang mana pemimpin berhasil membuat pegawai Rutan percaya dengan kepemimpinannya. Aspek (4) *listening*, (5) *empathy*, (6) *healing*, dan (7) *awareness* juga telah dipenuhi dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan pegawai untuk menunjang kinerja pegawai, terbuka dengan kritik dan saran, serta

peka dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja Dispenduk Jatim dengan memberikan penyelesaian yang solutif.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang kinerja pegawai, Pimpinan harus peka dengan kondisi di lingkungan kerjanya, kondisi kerja dan pembagian beban kerja, serta kekurangan-kekurangan apa yang memerlukan penanganan secepatnya. Dengan demikian, secara tidak langsung Pimpinan Dispenduk Jatim juga melaksanakan aspek (8) *commitment to the growth of people*, karena dengan memenuhi kebutuhan pegawai, berarti pimpinan mendorong perkembangan pegawainya agar bekerja lebih baik dan bisa memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, aspek ini juga dipenuhi dengan cara memberikan motivasi yang rutin diberikan saat apel pagi. Seiring berjalannya waktu, Pimpinan Dispenduk Jatim akan menjalankan aspek (9) *foresight* berkaitan dengan evaluasi kerja yang harus dilakukan pimpinan di keseluruhan lingkungan kerja Dispenduk Jatim. Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan sudah tentu akan memenuhi aspek (10) *conceptualization* di mana konsep yang dimiliki dan diyakininya akan dipraktikkan secara nyata. Berdasarkan penjelasan menurut 10 karakteristik pemimpin yang mempunyai jiwa *servant leadership* menurut Spears maka Pimpinan di lingkungan kerja Dispenduk Jatim telah menerapkan model kepemimpinan yang dikemukakan oleh Robert K. Merton bahwa *servant leadership* menitikberatkan pada minat pimpinan untuk memberikan perhatian dan membantu 'followers' untuk tumbuh dan berkembang dalam organisasi (Liden et al., 2008; Northouse, 2021).

Servant leadership memberikan gambaran keyakinan bahwa tujuan organisasi akan tercapai dalam jangka panjang hanya dengan pertama-tama memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan umum individu yang membentuk organisasi (Patterson, 2003; Spears, 2005). Oleh karena itu gaya kepemimpinan yang menekankan bahwa pemimpin harus memperhatikan keprihatinan pengikut mereka dan berempati dengan mereka; mereka harus merawat mereka dan mengasuh mereka (Liden et al., 2008). Tes terbaik pemimpin adalah apakah mereka yang dilayani tumbuh sebagai pribadi dan apakah saat dilayani mereka menjadi lebih sehat, lebih bijaksana dan lebih mampu menjadi pemimpin yang melayani (Yukl et al., 2013). Teori kepemimpinan pelayan sebagai gaya etis dalam kepemimpinan dan manajemen cukup penting di antara gaya kepemimpinan dan dapat dikatakan sebagai salah satu gaya ideal dalam mengelola sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa *servant leadership* yang diterapkan pada dispenduk Jatim mengacu pada konsep Spears (2004) yang berpegang pada 10 prinsip jiwa kepemimpinan yakni, 1) *building community*, (2) *persuasion* dan (3) *stewardship*, (4) *listening*, (5) *empathy*, (6) *healing*, (7) *awareness*, (8) *commitment to the growth of people*, (9) *foresight* dan (10) *conceptualization*. Hasil tersebut membuktikan bahwa *servant leadership* merupakan kunci menuju dunia yang lebih baik yang sangat dibutuhkan orang, lebih bebas, lebih sehat, lebih manusiawi dan lebih sejahtera.

Mengingat permintaan saat ini untuk manajemen yang lebih etis, berpusat pada orang, kepemimpinan yang diilhami oleh ide-ide dari teori kepemimpinan yang melayani mungkin sangat dibutuhkan oleh organisasi sekarang. Ini karena ini adalah gaya kepemimpinan yang baik untuk pemimpin maupun yang dipimpin karena etis, praktis, dan cara yang berarti untuk hidup dan dipimpin. Gaya kepemimpinan ini ditemukan berhubungan positif dengan kepercayaan, perilaku anggota organisasi, keadilan prosedural, usaha ekstra, komitmen organisasi, pemenuhan kebutuhan pengikut dan pola pikir promosi. Oleh karena itu, servant leadership merupakan gaya kepemimpinan yang harus dianut oleh organisasi saat ini untuk meningkatkan loyalitas, komitmen, dan kinerja pegawai.

REFERENSI

- Andhika, L. R. (2020). Kajian Literatur: Studi Pemetaan Sistematis Indikator Inovasi Sektor Publik. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian* <http://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/view/150>
- Aryanti, D., & Prasajo, E. (2021). Manajemen Pengetahuan pada Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis 2010-2021. *Jurnal Academia Praja*. <https://mail.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/445>
- Daft, R. L. (2014). *The leadership experience*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=KOfKAgAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR4%5C&dq=leadership%5C&ots=CI0oEvclrZ%5C&sig=N94-hZRIYVO9Ifdim5zcSV2SJNg>
- Dierendonck, D. Van. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/0149206310380462>
- Dinh, J. E., Lord, R. G., Gardner, W. L., Meuser, J. D. (2014). Leadership theory and research in the new millennium: Current theoretical trends and changing perspectives. *The Leadership* <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984313001203>
- Fry, L. W., Vitucci, S., & Cedillo, M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline. *The Leadership Quarterly*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984305000779>
- Gill, R. (2011). *Theory and practice of leadership*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=1YIQAgAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP2%5C&dq=leadership%5C&ots=hFv30LsvyP%5C&sig=Gr8TSOb9kkadz zzp5HI3Z4pEDo8>
- Greenleaf, R. K. (2002). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=AfjUgMJlDK4C%5C&oi=fnd%5C&pg=PT33%5C&dq=leadership%5C&ots=iCXGMPEmrd%5C&sig=d5BCH7E_mYZgPkkWW93Q_3P_XWU
- Lambert, L. (2003). *Leadership capacity for lasting school improvement*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=ffJoCwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=leadership%5C&ots=ZjwQFDyl_U%5C&sig=iHtIABYqGHN2pRJzw921skqJLlg
- Leedy, P. D. & Ormrod, J. E. (2014). *Practical research planning and design* (10th ed.). New York, NY: Pearson Education
- Lesminadi, G., & Hardjono, R. W. A. (2021). Servant Leadership: Sebuah Gaya Kepemimpinan

Yang Mengayomi dan Melayani, Ditinjau Dari Penyesuaian Sosial. *Jurnal Ilmiah Psikologi*

<https://scholar.archive.org/work/6mqv4z4sabacrcj3chdknyvozy/access/wayback/https://jurnal.uns.ac.id/candrajiwa/article/download/55890/pdf>

Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., & Henderson, D. (2008). Servant leadership: Development of a multidimensional measure and multi-level assessment. *The Leadership Quarterly*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984308000040>

Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=6qYLEAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PT14%5C&dq=leadership%5C&ots=QPbhu7Se9v%5C&sig=4AfCAEnq2t3asRz1Y-sBNrkGcWY>

Patterson, K. A. (2003). *Servant leadership: A theoretical model*. search.proquest.com. <https://search.proquest.com/openview/060158b52c355bdd0a31e67bc006f6f5/1?pq-origsite=gscholar%5C&cbl=18750%5C&diss=y>

Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Pendleton, D., & King, J. (2002). Values and leadership. *BMJ*. <https://www.bmj.com/content/325/7376/1352.full-text>

Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. In *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi* 103.114.35.30. <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/download/968/685>

Ridwan, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/view/6164>

Russell, R. F. (2001). The role of values in servant leadership. *Leadership & Organization Development Journal*. <https://doi.org/10.1108/01437730110382631>

Russell, R. F., & Stone, A. G. (2002). A review of servant leadership attributes: Developing a practical model. *Leadership & Organization Development*. <https://doi.org/10.1108/01437730210424>

Schwandt, T. A. (2015). *The Sage dictionary of qualitative inquiry* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE

Sendjaya, S., & Sarros, J. C. (2002). Servant leadership: Its origin, development, and application in organizations. *Journal of Leadership* <https://doi.org/10.1177/107179190200900205>

Sendjaya, S., Sarros, J. C. (2008). Defining and measuring servant leadership behaviour in organizations. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00761.x>

Spears, L. C. (2002). Tracing the past, present, and future of servant-leadership. *leadership: Servant-leadership for the 21st* Wiley New York, NY.

Spears, L. C. (2005). The Understanding And Practice Of Servant-Leadersmp. *The International Journal of Servant-Leadership*. <https://search.proquest.com/openview/a2fba7fd913a257ee4c6495488606fc3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=3887264>

Spears, L. C., & Lawrence, M. (2002). *Focus on leadership: Servant-leadership for the twenty-first century*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dXKCYps7WxQC&oi=fnd&pg=PR5&dq=servant+leadership+leadership&ots=LWYELg7Ho2&sig=KArKXKeg8aYYb3gSR_IJ Ey51YvQ

Stone, A. G., Russell, R. F., & Patterson, K. (2004). Transformational versus servant leadership: A difference in leader focus. *Leadership & Organization* <https://doi.org/10.1108/01437730410538671>

- Sururi, A. (2019). Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Pada Organisasi Sektor Publik Kelurahan. *NATAPRAJA*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/24769>
- Wren, J. T. (2013). *The leader's companion: Insights on leadership through the ages*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=%5C&id=uBr1CCs5xeYC%5C&oi=fnd%5C&pg=PR9%5C&dq=leadership%5C&ots=lJoaxLsHux%5C&sig=MmSi_MTEGVHIYxGB7mWAJrbUAqo
- Yukl, G., Mahsud, R., Hassan, S. (2013). An improved measure of ethical leadership. *Journal of Leadership*. <https://doi.org/10.1177/1548051811429352>



Penerapan Sapta Pesona Potensi Desa Wisata Petik Jambu di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Astrid Eka Wahyu Cahya Megananda¹, Hasan Ismail²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

DOI:<https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.36>

CORRESPONDENCE

E-mail: astridewcm@gmail.com

KEYWORDS

Sapta Pesona, Tourist Village, Picking Guava

ABSTRACT

Tourism is the sector most affected by the outbreak of the Covid-19 pandemic. This condition occurs all over the world in various sizes and dimensions. The existence of Sapta Pesona, seven conditions that must be applied and disseminated in people's daily lives, can increase the attractiveness and competitiveness of tourism. This refers to the support and role of the community as the host in creating an environment and atmosphere that can encourage the growth and development of the tourism industry through the embodiment of these seven elements. Kebaron Village is one of the villages in Sidoarjo with guava garden tourism sites and is very rich in guava products. In the village of Kebaron in Sidoarjo, various varieties of guava are planted in an area of 5.5 hectares, there are about 1,200 guavas. One of the obstacles to picking guava tourism in Kebaron village is the reduced number of visitors after the Covid-19 pandemic which started in early 2020. Therefore, it is necessary to add and renovate the garden area by adding supporting infrastructure. Based on the analysis with partners, there are several issues that need to be addressed immediately.

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak dari merebaknya pandemi Covid-19. Rekor sumber global mengklaim bahwa industri perjalanan berpotensi kehilangan 120 juta pekerjaan dengan kerugian hingga 2,7 triliun USD akibat wabah Covid-19. Kondisi ini terjadi di seluruh dunia dalam berbagai ukuran dan dimensi. Selain itu, grafik menunjukkan penurunan dramatis dalam perjalanan antar negara, dengan hampir semua negara menerapkan pembatasan perjalanan (Hall et al., 2020; The Guardian, 2020; World Travel and Tourism Council, 2020).

Desa Kebaron merupakan salah satu desa dengan tujuan wisata kebun jambu biji di Sidoarjo yang memiliki hasil panen hasil pertanian jambu biji yang sangat kaya. Mengenai varietas jambu biji yang berbeda, yang akan ditanam di lahan seluas 5,5 hektar di desa Sidoarjo di Kebara, dengan total sekitar 1200 jambu biji. Mengenai jenis jambu biji yang akan ditanam di kebun, ada lima jenis jambu biji, antara lain jambu putih jenis kristal, jambu merah bangkok, jambu ungu lokal dan jambu putih jenis sukun.

Pandemi ini juga secara tidak langsung menyerang wisata petik jambu di Desa Kebaron. Sebelum pandemi, wisata petik jambu terbuka untuk umum. Dengan bantuan media sosial, banyak warga yang berkunjung ke kebun jambu biji untuk memetik sendiri buah jambu biji merah. Kebun jambu merah seluas 5,5 hektar di desa Timuri, Kebaron, Kabupaten Tulangan, di lahan desa, siap panen. Puluhan kilogram jambu biji merah yang bisa dipetik dari kebun jambu biji setiap hari. Pasca pandemi, jumlah pengunjung kebun jambu menurun drastis, sehingga kondisi kebun tidak lagi sama.

Salah satu kendala wisata petik jambu di desa Kebaroni adalah penurunan pengunjung pasca pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan dan renovasi areal kebun dengan menambah infrastruktur pendukung. Berdasarkan analisis dengan mitra, ada beberapa persoalan yang perlu segera dibenahi. antara lain; (1) Meningkatkan kebersihan jalan setapak dan jalan setapak di area taman dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pengunjung untuk lebih mengenal area taman. (2) Menambahkan beberapa lokasi foto bagi pengunjung untuk berfoto bersama dan mengaksesnya di media sosial, yang dapat meningkatkan popularitas pariwisata di media sosial.

Sapta Pesona atau Tujuh Pesona adalah terminologi industri pariwisata Indonesia. Istilah ini diciptakan pertama kali. Menurut Pedoman Pelaksanaan Sadar Wisata (2008), Sapta Pesona merupakan faktor penting dalam pengembangan daya tarik wisata. Citra dan kualitas pariwisata atau tujuan wisata suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi Sapta Pesona di daerah tersebut. Sapta Pesona adalah tujuh syarat yang harus diterapkan dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata Indonesia. Sapta Pesona merupakan penjelasan dari konsep sadar wisata. Hal ini mengacu pada dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata dengan mewujudkan ketujuh unsur tersebut. Logo Sapta Pesona berbentuk matahari yang tersenyum melambangkan semangat hidup dan kegembiraan.

Tujuh penjuru sinar matahari yang tersusun rapi mengelilingi matahari merepresentasikan unsur Sapta Pesona yang terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, baik dan berkesan. Penjelasan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keamanan. Kondisi lingkungan suatu tempat tujuan wisata atau tujuan wisata yang memberikan rasa damai dan lega dari rasa takut dan cemas ketika seorang musafir melakukan perjalanan atau mengunjungi suatu daerah. Mode operasi termasuk pengaturan yang tidak mempengaruhi kenyamanan wisatawan. Membantu dan melindungi wisatawan. Tunjukkan sikap ramah kepada wisatawan. Jaga keamanan lingkungan. Tolong bantu informasikan kepada wisatawan. Menjaga lingkungan bebas dari risiko penyakit menular dan meminimalkan risiko kecelakaan saat menggunakan ruang publik.
- 2) Kondisi lingkungan dan pelayanan daerah tujuan/destinasi wisata mencerminkan kedisiplinan yang tinggi dan konsisten, kualitas fisik dan pelayanan yang teratur dan efisien, kenyamanan dan ketenangan wisatawan saat berwisata atau berkunjung ke daerah tersebut. Bentuk tindakan yang akan dilakukan adalah: Ciptakan budaya turnaround. Menjaga lingkungan dengan mengikuti peraturan yang berlaku. disiplin

tepat waktu/tepat waktu dan; semuanya jelas, teratur dan rapi dan lancar.

- 3) Bersih Kualitas produk dan pelayanan destinasi wisata yang mencerminkan kondisi lingkungan dan kesehatan destinasi wisata, sehingga wisatawan dapat merasa nyaman dan nyaman selama melakukan perjalanan atau berkunjung. Tindakan yang akan dilakukan antara lain: Jangan mencemari. Perhatikan kebersihan di sekitar tempat wisata. Menjaga lingkungan bebas polusi udara. Siapkan makanan dan minuman secara higienis. Siapkan peralatan bersih untuk menyajikan makanan dan minuman. Pakaian dan penampilan staf yang bersih dan pantas.
- 4) Kondisi destinasi wisata yang bagus mencerminkan kondisi sejuk dan teduh menawarkan rasa nyaman bagi wisatawan saat berkunjung ke kawasan tersebut. Sumber daya meliputi: Lestarkan lingkungan hijau dan kesejukan destinasi wisata di berbagai kawasan wisata.
- 5) Destinasi wisata yang indah, mencerminkan kondisi yang indah dan menarik, melihat peluang kunjungan wisatawan berulang kali, dan menimbulkan kesan mendalam untuk mempromosikan publisitas di pasar pariwisata yang lebih luas. Sumber daya meliputi: Melindungi wisatawan dalam lingkungan yang estetik, alami dan harmonis. Teratur menata lingkungan dan melestarikan keindahan tanaman, tanaman hias dan keteduhan.
- 6) Kondisi lingkungan yang ramah karena sikap masyarakat di kawasan wisata yang mencerminkan suasana ramah dan terbuka. Tindakan: Jadilah tuan rumah yang baik dan selalu membantu wisatawan. Memberikan informasi yang akurat tentang bea cukai. Tunjukkan rasa hormat dan maaf kepada turis dan tersenyumlah dengan tulus. Kenangan Berupa pengalaman tak terlupakan di suatu destinasi yang menawarkan keceriaan dan kenangan indah bagi wisatawan. Tindakan: Temukan dan promosikan keunikan budaya lokal. Menyajikan makanan dan minuman lokal yang bersih dan sehat. Menawarkan oleh-oleh yang menarik, unik dan mudah dikenali yang mudah dibawa.

Menurut Butler (2015), destinasi wisata merupakan tempat umum yang memberikan kesempatan bagi orang-orang dalam hubungan imigran lokal untuk mengakses berbagai atraksi dan layanan. Di sisi lain, menurut UNWTO, destinasi pariwisata adalah ruang fisik dengan batas fisik dan administratif, termasuk layanan, produk, dan atraksi. Ada beberapa poin penting yang dapat menjadikan kawasan tersebut sebagai tujuan wisata, berikut poin-poinnya: (1) Menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. (2) Fasilitas Penunjang dan Atraksi. (3) Letak Geografis. (4) Jalur transportasi yang baik. (5) Stabilitas politik. (6) Lingkungan yang sehat. (7) Pemerintah tidak memiliki larangan/pembatasan.

Dalam penelitian ini, potensi wisata dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: potensi alam, potensi budaya dan potensi manusia. (1) Potensi alam Pemanfaatan potensi alam mengacu pada komposisi kawasan, jenis tumbuhan dan satwa, bentang alam kawasan, seperti pantai, hutan, dan lain-lain. (komposisi fisik kawasan). Kelebihan dan keunikan alam, jika dikembangkan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan, pasti akan menarik wisatawan untuk menjelajahi destinasi tersebut. (2) Potensi budaya Pemanfaatan potensi budaya mengacu pada seluruh cipta, rasa dan karsa manusia yang berupa adat istiadat, kerajinan, kesenian, peninggalan sejarah kuno berupa bangunan, monumen, dan lain-lain. (3) Potensi Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata dengan menampilkan tarian/pertunjukan dan seni budaya di sekitarnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif yang dibuat dengan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan gejala, fakta atau peristiwa secara sistematis dan akurat tergantung pada sifat populasi atau wilayah tertentu. Selama proses pengumpulan data ini dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi terkait perencanaan Sapta Pesona di Desa Kebaron. Dan data utama dari penelitian ini adalah kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, sekretaris Dinas Kebudayaan dan Promosi Pariwisata dan sektor pariwisata. Kemudian dalam analisis data khususnya melalui reduksi, penyajian data yang diterangkan dalam bentuk rangkaian pertanyaan yang diteliti dan dikontrol, dimana kesimpulan dari penelitian kuantitatif adalah menemukan sesuatu yang baru atau baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa wisata merupakan bagian dari melestarikan budaya desa untuk menciptakan UKM di desa dan membantu meningkatkan pendapatan keuangan desa serta menjadi ikon desa. Untuk menjadi desa wisata, beberapa hal harus diperhatikan. Yakni standardisasi, berguna untuk mendorong kualitas pelayanan desa. Standardisasi tersebut di atas disebut Sapta Pesona. Sapta Pesona memiliki 7 item diantaranya Sapta Pesona yang diterapkan pada wisata pemilihan jambu biji di Desa Kebaron:

Keamanan

Kondisi lingkungan suatu tempat tujuan wisata atau tujuan wisata yang memberikan rasa damai dan lega dari rasa takut dan cemas ketika seorang musafir melakukan perjalanan atau mengunjungi suatu daerah. Bentuk prosesnya antara lain perbaikan dan modernisasi fasilitas wisata pilihan jambu di Desa Kebaron untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Ketertiban

Lingkungan dan pelayanan pemetikan jambu di Desa Kebaron mencerminkan kedisiplinan yang tinggi dan konsisten, kualitas fisik dan pelayanan yang teratur dan efisien, kenyamanan dan ketenangan bagi wisatawan yang berwisata atau berkunjung ke kawasan tersebut. Bentuk tindakan yang akan dilakukan adalah: Ciptakan budaya turnaround. Menjaga lingkungan dengan mengikuti peraturan yang berlaku. disiplin tepat waktu/tepat waktu dan; semuanya jelas, teratur dan rapi dan lancar.

Bersih

Kualitas produk dan pelayanan Wisata Petik Jambu Biji di Desa Kebaron yang bersih dan sehat dapat mencerminkan kondisi lingkungan dan kesehatan destinasi wisata, sehingga wisatawan dapat merasa nyaman dan nyaman saat berwisata atau berkunjung. Tindakan yang

dapat dilakukan antara lain: Tanamkan kebiasaan tidak meninggalkan sampah. Menjaga kebersihan di sekitar kawasan Wisata Petik Jambu Desa Kebaron. Menjaga lingkungan bebas polusi udara. Pastikan makan dan minum higienis. Serta menyediakan peralatan bersih untuk menyajikan makanan dan minuman. Pakaian dan penampilan staf bersih dan sopan.

Sejuk

Wisata pilihan negara jambu mencerminkan kondisi sejuk dan rindang yang membawa rasa nyaman wisatawan saat berkunjung ke kawasan tersebut. Sumber daya meliputi: Lestarkan lingkungan hijau dan kesejukan destinasi wisata di berbagai kawasan wisata.

Keindahan

Destinasi yang mencerminkan kondisi yang indah dan menarik akan memungkinkan kunjungan wisatawan berulang kali dan meninggalkan kesan yang mendalam untuk mempromosikan promosi ke pasar pariwisata yang lebih luas. Kegiatan yang dilakukan di Destinasi Wisata Petik Jambu Desa Kebaroni adalah Melindungi wisatawan dalam lingkungan yang estetik, alami dan harmonis. Teratur menata lingkungan dan melestarikan keindahan tanaman, tanaman hias dan keteduhan.

Keramahan

Kondisi lingkungan yang dihasilkan dari sikap masyarakat di kawasan wisata mencerminkan suasana akrab dan terbuka. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan di destinasi Wisata Petik Jambu Desa Kebaroni antara lain misalnya: untuk menjadi tuan rumah yang baik. Memberikan informasi yang akurat dan konsisten. Tunjukkan rasa hormat dan maaf kepada turis dan tersenyumlah dengan tulus.

Kenangan

Berupa pengalaman tak terlupakan di suatu destinasi yang menawarkan kesenangan dan kenangan indah bagi wisatawan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain: Temukan dan promosikan keunikan budaya lokal. Menawarkan oleh-oleh yang menarik, unik dan mudah dikenali serta mudah dibawa seperti souvenir berbentuk stiker yang dipasang di Wisata Petik Jambu di Desa Kebaron

Sebagaimana oleh Rahim (2012:56), program Sapta Pesona merupakan pengembangan konsep sadar wisata dalam kaitannya dengan dukungan dan peran masyarakat tuan rumah dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif. Menumbuhkan dan mengembangkan industri pariwisata melalui pencapaian tujuh unsur Sapta Pesona. Masyarakat sadar wisata memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan Sapta Pesona Wisata. Dengan demikian, Sapta Pesona merupakan gambaran konsep pariwisata yang erat kaitannya dengan dukungan dan peran masyarakat tuan rumah, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pariwisata. melalui penerapan tujuh unsur Sapta Pesona. Jika pemerintah kota tidak mendukung wisata Sapta Pesona, pengunjung tidak akan tenang saat berwisata.

Oleh karena itu, program Sapta Pesona merupakan upaya untuk mempromosikan dan

mengembangkan industri pariwisata petik jambu di Desa Kebaron, dukungan dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi daerah atau tujuan wisata. Turis memetik jambu biji. melalui pelaksanaan program Sapta Pesona. Jika ketujuh unsur Sapta Pesona dalam pengembangan wisata ini dilaksanakan pada fasilitas wisata Acar Jambu Biji, maka akan menghasilkan:meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke pemetik jambu biji. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap promosi pariwisata yang dirinci dalam beberapa aspek dalam pernyataan berikut.

Selain itu, kegiatan Sapta Pesona ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima dan terorganisir dalam realisasi penyelenggaraan untuk mengembangkan kebiasaan baik yang akan diterapkan dalam praktek di bidang pariwisata. Salah satunya adalah Desa Kebaron di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang menjadi desa Sapta Pesona yang terkenal dengan wisata kolam renang dan wisata petik jambu.

Keberhasilan industri pariwisata Indonesia dapat dilihat dari potensi kegiatan pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia, karena bagaimanapun upaya yang dilakukan, jika kualitas sumber daya manusia tidak baik, pasti akan mempengaruhi perkembangan pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata Sapta Pesona dan Sadar Wisata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berperan dalam mewujudkan 7 Sapta Pesona yang dicanangkan pemerintah yaitu Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Efisien. Penerapan Sapta Pesona untuk promosi wisata jambu di Desa Kebaron bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci pelaksanaan pengembangan destinasi wisata.

Jadi, harapan kita ke depan, berdasarkan hasil wawancara di atas, kita harus menciptakan situasi yang kondusif, rasa nyaman, rasa aman, ketertiban, kebersihan, keindahan, kesejukan, dan keramahan para pedagang. di sekitar mereka menyambut penduduk setempat. dan wisatawan mancanegara. Oleh karena itu SDM yang baik memiliki inovasi dan keterampilan yang profesional, sehingga mendukung pengembangan wisata petik jambu di Desa Kebaron. Dan yang tidak kalah penting pelibatan masyarakat dalam situasi ini adalah cara masyarakat berpartisipasi dalam aplikasi Sapta Pesona untuk mengembangkan destinasi pemetik jambu yang menciptakan rasa kebersamaan dan Menciptakan suasana yang kondusif untuk kenyamanan wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan potensi budaya dan alam dapat digali melalui promosi pariwisata dan persaingan di pasar global, khususnya di sektor pariwisata. Sasaran Sapta Pesona adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, baik administrasi, swasta maupun masyarakat pada umumnya, agar dapat bertindak dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didasarkan pada beberapa faktor yang membantu membuat wisatawan betah, puas dan memberikan kesan yang baik kepada pengunjung. Selain itu, masih banyak destinasi wisata yang lebih baik di Indonesia yang dapat menciptakan kondisi dan kualitas pariwisata yang lebih baik. Stek adalah pemotongan atau pemotongan bagian tanaman seperti akar, batang, daun dan pucuk untuk membentuk akar baru. Beberapa manfaat injeksi adalah: Tidak ada batasan waktu/musim, individu dapat naik level terus menerus.

Bersih jalanan dengan wisata petik jambu untuk membangkitkan kesadaran warga desa

Kebaron untuk menciptakan suasana jalanan yang damai, asri dan bersih sebagai wujud pesona Sapta.Cinderamata merupakan salah satu hal terpenting dalam industri pariwisata. Itu karena cedera mata sangat erat kaitannya dengan kegiatan liburan. Cinderamata berfungsi sebagai pengingat atau bukti bahwa wisatawan yang bersangkutan pernah datang atau sedang berkunjung ke tempat tersebut. Suvenir bahkan merupakan produk wisata. Oleh karena itu, banyak sekali oleh-oleh yang memiliki ciri khas tempat wisata dan kearifan lokal, atau sering disebut sebagai oleh-oleh lokal.

Konstruksi jembatan didasarkan pada ruas-ruas yang terputus oleh rintangan seperti sungai, danau, selat, kanal, lembah atau ngarai. Dalam program kerja kami, membangun jembatan menuju kebun jambu biji merupakan salah satu infrastruktur terpenting yang akan memberikan akses yang lebih baik bagi pengunjung ke kebun jambu biji. Pembuatan spot foto di tempat wisata petik jambu di Desa Kebaron merupakan salah satu program kerja kami, dimana tujuan dari foto spot tersebut adalah untuk meningkatkan minat pengunjung dan memperindah kawasan wisata petik jambu, dan kami juga berharap dapat meningkatkan jumlahnya. pengunjung yang datang ke lokasi foto ini untuk wisata petik jambu di desa Kebaron.

Dukungan belajar adalah kegiatan fundamental penting yang mudah dilaksanakan. Bantuan ini menentramkan dan fokus pada pembelajaran siswa. Bantuan belajar ini telah banyak diterapkan oleh siswa sekolah dasar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, alat ini digunakan untuk memotivasi siswa agar selalu semangat dalam belajar sehingga cita-citanya tercapai.

KESIMPULAN

Kesimpulannya ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk menjadi desa wisata. Yakni standardisasi, berguna untuk mendorong kualitas pelayanan desa. Standardisasi tersebut di atas disebut Sapta Pesona. Seperti disampaikan Rahim, program Sapta Pesona merupakan konsep sadar wisata yang mengacu pada dukungan dan peran masyarakat tuan rumah dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif. Masyarakat sadar wisata memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan Sapta Pesona Wisata. Dengan demikian, Sapta Pesona merupakan gambaran konsep pariwisata yang erat kaitannya dengan dukungan dan peran masyarakat tuan rumah, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pariwisata. Oleh karena itu, program Sapta Pesona merupakan upaya untuk mempromosikan dan mengembangkan industri pariwisata petik jambu di Desa Kebaron, dukungan dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi daerah atau tujuan wisata. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam mempromosikan pariwisata, yang dirinci dalam beberapa aspek dalam pernyataan berikut.

Selain itu, kegiatan Sapta Pesona ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima dan terorganisir dalam pelaksanaan pelaksanaannya untuk mengembangkan kebiasaan baik yang akan diterapkan dalam praktik industri pariwisata. Salah satunya adalah Desa Kebaron di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang menjadi desa Sapta Pesona yang terkenal dengan wisata kolam renang dan wisata petik jambu. Maka

harapan kami kedepan berdasarkan hasil wawancara di atas adalah kita harus menciptakan situasi yang kondusif, rasa nyaman, rasa aman, ketertiban, kebersihan, keindahan, kesejukan dan keramah-tamahan para pedagang untuk membawa masyarakat setempat untuk menyambut. dan wisatawan mancanegara. Oleh karena itu SDM yang baik memiliki inovasi dan keterampilan yang profesional, sehingga mendukung pengembangan wisata petik jambu di Desa Kebaron.

Dan yang tidak kalah penting partisipasi masyarakat dalam situasi ini adalah cara masyarakat berpartisipasi dalam aplikasi Sapta Pesona untuk mengembangkan destinasi pemetik jambu yang menciptakan rasa kebersamaan dan Menciptakan suasana kondusif untuk kenyamanan didasarkan pada beberapa faktor yang membantu wisatawan betah, puas dan memberikan kesan yang baik kepada pengunjung. Selain itu, masih banyak destinasi wisata yang lebih baik di Indonesia yang dapat menciptakan kondisi dan kualitas pariwisata yang lebih baik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi diantaranya adalah:

- 1) Membuka jalan bagi wisata petik jambu untuk meningkatkan kesadaran warga desa Kebaron untuk menciptakan suasana jalan yang rindang, asri dan bersih.
- 2) Pembuatan dan mempercantik situs jambu biji sebagai spot foto dan atraksi wisata.
- 3) Dukungan BUMDES untuk meningkatkan keterampilan pemangkasan guna melestarikan dan membudidayakan jambu biji sebagai ikon wisata desa Kebaron.
- 4) Membantu warga Desa Kebaron Area 1 meningkatkan keterampilan cinderamata untuk meningkatkan perekonomian warga desa.
- 5) Membantu pengurus BUMDES dalam pembuatan film dokumenter wisata Jambu Biji sebagai destinasi wisata Desa Kebaron melalui media sosial berbasis android.
- 6) Menyelenggarakan lomba menggambar dan melukis untuk mempresentasikan wisata petik jambu di Desa Kebaron.

REFERENSI

- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Wisata di Provinsi Lampung dan Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2).
- Suyadi, S. (2015). Pengaruh Program Sapta Pesona terhadap Peningkatan Pengunjung Obyek Wisata Guci Tegal. *Jurnal Utilitas*, 1(2), 157-169.
- Hardiani, W. A. A., Putri, J. A., Octafian, R., Satoto, Y. R., & Krisn Natalia, H. (2021). Penguatan Desa Wisata Sikasur Di Era New Normal. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 4(1), 53-59.
- Haris, A., & Anas, A. (2021). SAPTA PESONA DESTINASI WISATA DI KABUPATEN SINJAI. *AlQisthi*, 11(2), 147-153.
- Nasution, L., Anom, S., & Karim, A. (2020). Pengaruh Program Sapta Pesona Dan Fasilitas Terhadap tingkat Kunjungan Objek Wisata T-Gardendi Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 211-230.

- Purwaningsih, O., & Wahana, T. (2018). Penguatan Nilai Karakter Masyarakat untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Harirah, Z., Azwar, W., & Isril, I. (2021). Melacak Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 70-81.
- Asmoro, A. Y., & Aziz, M. (2020). Potensi Pengembangan Setigi sebagai Destinasi Wisata. (*JMK*) *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(3), 228-253.
- Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID 19. *JurnalDinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 383-389.
- Minantyo, H., Winarno, P. S., Soediro, M., & Kristama, B. Y. (2020). Pendampingan Usaha Pengembangan Produk Kudapan Dengan Bahan Jambu Biji di Desa Kebaron Sidoarjo. *JurnalAbadimas Adi Buana*, 4(1), 7-12.



Pola Komunikasi Organisasi Ketua Tim Sepakbola City Of Heroes Surabaya untuk Mengkoordinasi Anggota dalam Organisasi

Tri Prasetyowati¹, Fierda Nurany², Muhammad Novi Julia Resa³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.79>

CORRESPONDENCE

E-mail: trisprasetyowati@ubhara.ac.id

KEYWORDS

Communication, Pattern, Organizational, Coordination

ABSTRACT

Organizational communication is very important for every organization because communication within an organization is necessary for the team leader to coordinate every member. The pattern of organizational communication is also important for leadership in an organization because, with a good organizational pattern, the team leader can coordinate members effectively and comfortably. In the implementation of the organizational pattern of the city of heroes Surabaya football team leader, the researcher found the communication pattern used by the leader as: a) Wheel Communication Pattern, b) Chain Communication Pattern, c) Y Communication Pattern, and d) Star Communication Pattern. These communication patterns are used by the city of heroes Surabaya football team leader and are considered to be the most effective.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan sarana mendasar untuk seseorang mampu bersosialisasi di lingkungannya. Komunikasi juga merupakan sarana untuk orang menerima dan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang tersebut. komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan perseorangan ataupun kelompok untuk menyampaikan isi pikiran, informasi, ide, gagasan atau perasaan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung dalam penyampaian tentunya seseorang yang menyampaikan disebut sebagai komunikator dan seseorang yang mendengarkannya disebut sebagai komunikan. Komunikasi yang efektif terjadi apabila individu mencapai pemahaman bersama, merangsang pihak lain melakukan tindakan, dan mendorong orang untuk berpikir dengan cara baru. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif akan menambah produktifitas, baik individu yang bersangkutan maupun organisasinya, sehingga dapat mengantisipasi masalah, membuat keputusan secara efektif dan mengkoordinasikan arus kerja serta mengembangkan hubungan (Darmawan et al., 2021:507).

Komunikasi yang disampaikan baik antar individu maupun antar ketua organisasi kepada anggotanya juga sangat berpengaruh terhadap tujuan dari komunikasi tersebut yang dimana ketika komunikasi yang di sampaikan kurang baik maka tidak langsung akan menjadi kesalah pahaman antar komunikator kepada komunikan yang disitu juga dapat menyebabkan kegagalan dalam suatu tujuan organisasi maupun kesalahpahaman informasi yang disampaikan .

Pentingnya komunikasi baik yang dilakukan perorangan ataupun kelompok (organisasi) tidak dapat dipungkiri untuk saling terhubung. Komunikasi didalam organisasi juga sangat penting karena merupakan sarana untuk saling bertukar ide, gagasan, dan pikiran agar dapat saling terhubung dan juga dapat membangkitkan kinerja antar bagaian dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan sinergi dalam berorganisasi. Komunikasi juga sebagai alat utama dalam organisasi untuk saling terhubung sehingga ide, informasi, gagasan, dan pikiran antar anggota dapat terkoordinasi secara terarah. Oleh karena itu, komunikasi organisasi sangat perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi, karena komunikasi yang efektif dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi dan tanpa adanya komunikasi maka organisasi tersebut tidak dapat berjalan secara lancar. Komunikasi juga merupakan hal penting bagi organisasi karena komunikasi menjadi hal utama untuk keberhasilan suatu organisasi (Kusmanto, Khalis, & Risdiani, 2022).

Untuk pencapaian suatu oragnisasi diperlukan peran besar pemimpin organisasi yang dimana pemimpin dapat memotivasi para anggotanya dan mengkoordinir anggotanya kearah yang lebih baik. dalam organisasi, motivasi berfungsi untuk mendorong semangat berorganisasi para anggota organisasi agar mau aktif, berpartisipasi dan berkontribusi dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada dengan cara menyalurkan semua kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

Dalam berkomunikasi dalam organisasi yang dilakukan oleh ketua atau pemimpin kepada para nggotanya juga terdapat beberapa pola yang dimana pola yang digunakan ketua dalam menyampaikan informasi kepada anggotanya juga akan berdampak besar untuk tujuan dari informasi tersebut. Pola komunikasi organisasi merupakan hal penting dalam sistem pengendalian ketua kepada anggota organisasi yang bermaksud untuk mengarahkan, memotivasi, memonitor atau mengamati serta evaluasi pelaksanaan tugas organisasi. Pola yang ditetapkan akan menghasilkan manajemen organisasi yang baik atau tidak untuk itu pemimpin harus dapat memperhitungkan pola mana yang dapat menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi (Tamimi, Soetjipto, Sopiah, & Kurniawan 2022).

Pola komunikasi dalam organisasi penting adanya dikarenakan didalam sebuah organisasi perlu adanya pola untuk ketua dari organisasi tersebut bisa mengarahkan anggota serta bisa mengkoordinasi anggotanya dengan baik dan terarah sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati. (menurut Pramitningsih 2006:6 dalam Gori & Simamora, 2020:117) sebagai berikut yaitu : 1) Pola rantai Pola komunikasi lingkaran hanya terbentuk rantai merupakan sistem komunikasi birokrasi seperti pada umumnya yang mengikuti suatu pola komunikasi formal komunikasi berlangsung melalui saluran tentu mengikuti sistem hierarki organisasi secara ketat. 2) Pola lingkaran Pola atau jaringan komunikasi hanya merupakan

penyambung mata rantai awal dan akhir jaringan komunikasi rantai. Jumlah yang harus dilewati anggota A menjadi pendek, karena sekarang dia dapat berkomunikasi dengan E, tanpa harus melalui B, C dan D. Demikian pula jika A ingin berkomunikasi dengan E cukup dengan melewati D atau C atau B saja. 3) Pola roda Pola komunikasi berbentuk roda sangat berbeda dengan rantai, karena dalam pola komunikasi ini tingkat hierarki organisasi dikurangi. Pola roda diterapkan pada organisasi besar dengan membentuk suatu bagian sebagai pusat komunikasi yang mengendalikan jaringan komunikasi. 4) Pola saluran total Pola komunikasi saluran total menjamin komunikasi diantara setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok dapat secara langsung berkomunikasi dengan anggota-anggota lain tanpa melalui perantara. pola komunikasi yang dilakukan oleh ketua juga sangat berperan besar guna untuk keberhasilan suatu organisasi dikarenakan keberhasilan suatu organisasi bergantung pada pola organisasi yang dilakukan oleh ketua pada anggotanya. hal tersebut juga terjadi di tim sepakbola city of heroes surabaya yang dimana pola komunikasi yang dilakukan oleh ketua pada anggotanya tentu sangat berperan besar untuk keberhasilan suatu tujuan serta dari tim city of heroes surabaya.

Hal tersebut yang menjadi dasar peneliti untuk mengetahui : pola komunikasi apa yang di gunakan oleh ketua atau pemimpin tim sepakbola city of heroes surabaya untuk keberhasilan mengkoordinasi anggotanya., apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan pola komunikasi organisasi yang dilakukan oleh ketua pada anggota tim sepakbola city of heroes surabaya. Hal-hal tersebut merupakan patokan untuk keberhasilan suatu organisasi yang tentunya hal tersebut juga terjadi di tim sepakbola city of heroes surabayan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2010:5. Yang dikutip dalam (Nugrahani, 2014). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan (wawancara) dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam (Nugrahani, 2014:124), menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, atau narasumber (ketua tim sepakbola city of heroes surabaya).

Teknik menganalisis data secara induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori (Rohmadi & Nasucha, 2015:34 yang dikutip dalam Salsabila Miftah Rezkie 2021 [www,dqlab.id](http://www.dqlab.id) Yang diakses 2023:30 jan). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus

menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rijali, 2018:91). Memverifikasi data atau menafsirkan, menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti. Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan: kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam perangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diujikebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya, jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya (Haruddin, 2018:8).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tim sepakbola *city of heroes* surabaya memiliki berbagai jadwal kegiatan rutin yang dilakukan yaitu : jadwal latihan rutin, jadwal separing antara club sepakbola, dan juga jadwal mengadakan event atau pertandingan antar club seperti yang sudah pernah dilakukan yaitu : mengadakan event atau pertandingan antar club sepakbola U12 di jawa timur yang bertujuan untuk mencari bibit-bibit muda yang nantinya akan dapat diarahkan ke jenjang yang lebih baik agar bakat-bakat yang dimiliki oleh bibit-bibit muda tersebut tidak hangus sia-sia. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut perlunya sebuah komunikasi baik internal maupun komunikasi eksternal. berikut gambaran pelaksanaan kegiatan latihan rutin tim sepakbola *city of heroes* surabaya.



Gambar 1 : Latihan rutin

Komunikasi berasal dari kata *Communicare* yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi atau memberitahukan, menyampaikan pesan, informasi, gagasan dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan feedback (menurut Santoso 2009:31 dalam (Gori & Simamora, 2020:116). Bentuk-bentuk komunikasi organisasi menurut (Gori & Simamora, 2020:117) yaitu : a) Komunikasi Intrapersonal Komunikasi Intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi pada diri sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan pemberian makna yang diberikan oleh diri sendiri seperti sensasi, asosiasi, persepsi, memori dan berpikir; b) Komunikasi Interpersonal Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung diantara dua orang atau lebih secara tatap muka dengan menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara pesan langsung; c) Komunikasi Kelompok (*group communication*) adalah komunikasi yang berlangsung bersama beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi dan sebagainya. Yang termasuk didalamnya adalah komunikasi tatap muka (*face to face*) karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat; d) Komunikasi massa (*massa communication*) Menurut Suharsono dan Dwiantara (2013:27 Yang dikutip dalam Gori & Simamora, 2020:117) Komunikasi massa pada dasarnya adalah kegiatan komunikasi yang ditunjukkan kepada massa (khalayak umum) dengan menggunakan media massa.

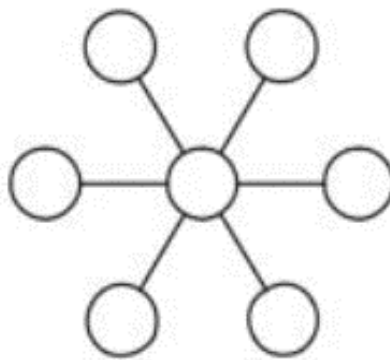
City Of Heroes Surabaya merupakan sebuah wadah untuk peminat sepakbola yang dimana tim ini memiliki struktur kepengurusan yang memiliki pemimpin dan juga anggota terpercaya sebagai pengurus manajemen dalam tim ini, tujuan dari dibuatnya tim ini yaitu sebagai wadah peminat sepakbola yang tadinya tidak memiliki tim tetap bisa menyalurkan hoby mereka dengan bergabung langsung dengan tim ini dengan konfirmasi pengurus tim atau melalui media sosial IG dan WA. Dalam mencapai tujuan *City of Heroes* seperti yang sudah dijelaskan di atas, motivasi dari para anggota dan ketua sangat diperlukan karena motivasi berfungsi untuk mendorong semangat anggota untuk berorganisasi para anggota organisasi agar mau aktif, berpartisipasi dan berkontribusi dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut.

Dalam mencapai tujuan suatu organisasi diperlukan komunikasi yang baik dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi yang dilakukan dengan baik dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan organisasi hal tersebut dikarenakan setiap anggota dalam organisasi tersebut dapat terhindar dari konflik eksternal atau eksternal dalam organisasi. komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin suatu organisasi juga memerlukan suatu pola komunikasi yang baik yang dimana dengan menggunakan pola komunikasi yang baik yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggotanya agar anggota organisasi tersebut dapat menerima perintah ataupun mengkoordinasi anggotanya dan para anggota dapat menerima informasi dari pemimpin dengan baik dan terhindar dari miskomunikasi.

Pola komunikasi organisasi adalah suatu bentuk hubungan interaksi antara ketua kepada anggotanya ataupun interaksi antara sesama anggota dalam penyampaian informasi. Yang dimana informasi tersebut dapat terhubung dari pemimpin kepada anggota organisasi. dalam penerapannya pola komunikasi organisasi sangat penting yang baik dilakukan oleh pemimpin tim sepakbola *city of heroes* surabaya kepada anggotanya dikarenakan agar hubungan antar pemimpin dan anggota dapat terjalin dengan baik dan hal-hal yang disampaikan oleh pemimpin dapat diterima dengan baik oleh anggota nya sehingga dapat terhindar dari miskomunikasi atau kesalahpahaman mengenai informasi tersebut.

Menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid (dalam Fajar, 2009 : 31-32 yang dikutip dalam (Asmaningsih, 2020:12) Pola komunikasi adalah suatu pola hubungan yang terbentuk antara dua orang atau lebih yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain dan bertujuan untuk memberikan gambaran terkait proses komunikasi yang sedang terjadi. Pola jaringan komunikasi menurut (V.Oisiana, 2016 yang dikutip dalam (Mendrofa & Syafii, 2019). Pola jaringan komunikasi dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu diantaranya:

Pola Komunikasi Roda



Gambar 2 Pola Komunikasi Roda

Pola komunikasi roda adalah pola komunikasi yang menggambarkan aliran informasi berasal dari satu sumber, yaitu pemimpinnya yang berada di posisi pusat. Pola komunikasi roda dalam sebuah organisasi sangat di perlukan, dimana suatu pesan akan berpusat pada seorang pemimpin, sebagai ketua dalam perkumpulan, komunitas dan sebagainya pola komunikasi roda perlu diterapkan mengingat bahwa anggota dalam organisasi akan

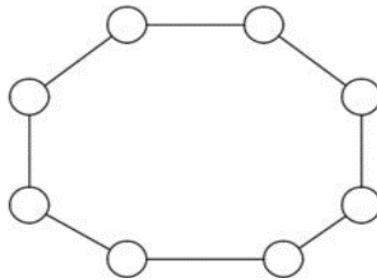
menerima pesan dari seorang pemimpin untuk melakukan segala kegiatan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tim sepakbola *city of heroes* surabaya peneliti menemukan dan menarik kesimpulan bahwa tim sepakbola *city of heroes* surabaya menggunakan pola komunikasi roda karena pola komunikasi roda sangat cocok dengan organisasi ini yaitu berfokus pada satu titik yang dimana pesan yang disampaikan oleh ketua tim sepakbola *city of heroes* surabaya dapat diterima langsung oleh anggotanya hal tersebut juga agar anggota dapat terhindar dari miskomunikasi atau kesalahpahaman dengan informasi yang disampaikan oleh ketua.

Dalam penerapannya pola komunikasi roda pada tim sepakbola *city of heroes* surabaya pemimpin tim sepakbola *city of heroes* surabaya menyampaikan informasi melalui kegiatan organisasi sehari-hari melalui grup WA dan informasi disampaikan secara langsung oleh ketua tim sepakbola *city of heroes* setelah jadwal latihan rutin dilapangan. Hal ini dinilai sangat efektif dilakukan oleh ketua dalam menyampaikan informasi kepada anggotanya.

Pola Komunikasi Lingkaran

Pola komunikasi lingkaran adalah pola komunikasi yang tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama dan memiliki wewenang untuk mempengaruhi kelompok. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tim sepakbola *city of heroes* surabaya tidak menggunakan pola komunikasi tersebut dikarenakan pola komunikasi ini kurang efektif dan dapat menimbulkan konflik antar anggota karena dapat terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman informasi. Dikarenakan sejatinya sebuah organisasi memiliki 1 orang pemimpin dan satu orang yang didengar agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

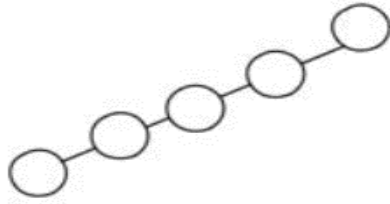


Gambar 3 : Pola Komunikasi Lingkaran

Pola Komunikasi Rantai

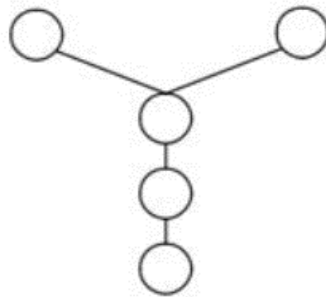
Pola komunikasi rantai adalah pola komunikasi yang menunjukkan tingkat kepercayaan pemimpin yang sangat tinggi pada bawahannya untuk menyampaikan informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tim sepakbola *city of heroes* surabaya jarang menggunakan pola komunikasi ini kecuali dalam event besar seperti akan mengadakan pertandingan dan uji coba (separing) antar tim. Hal ini dikarenakan seringkali penyebaran informasi mengenai jadwal rutin latihan yang dilakukan oleh ketua tim sepakbola *city of heroes* surabaya sering kali penyebarannya melalui media sosial WA dikarenakan dengan memanfaatkan jejak digital yang tidak mudah hilang hal tersebut

memudahkan penyebaran informasi yang dilakukan oleh ketua dapat secara langsung menyebar kepada anggotanya digrup WA.



Gambar 4 : Pola Komunikasi Rantai

Pola Komunikasi Y

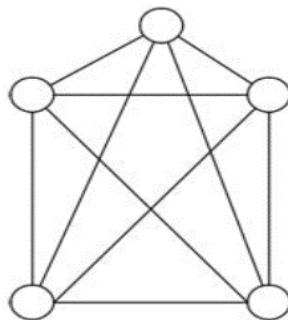


Gambar 5 : Pola Komunikasi Y

Pola komunikasi Y adalah pola komunikasi di mana pemimpin melakukan pelimpahan wewenang kepada anggota yang dipercayainya di kelompok dalam penyebaran informasi yang bersumber darinya. Pada polakomunikasi ini yang berperan adalah pengurus atau divisi dari organisasi tersebut hal ini juga dapat meringankan tugas ketua atau pemimpin dari organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa tim sepakbola city of heroes surabaya menggunakan pola komunikasi Y apabila akan diadakan event-event besar yang dimana ketua atau pemimpin tim akan mnugaskan setiap divisinya untuk melakukan tugasnya sesuai denga divisi masing-masing.

Pola Komunikasi Bintang



Gambar 6 : Pola Komunikasi Bintang.

Jenis pola komunikasi bintang adalah pola komunikasi yang saling berinteraksi semua anggota organisasi. Pola Menyeluruh (all Channel), yaitu seluruh anggota dan pemimpin memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan atau informasi sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan. Pola komunikasi seperti ini biasanya terjadi dalam momen-momen seperti rapat, diskusi, atau juga dalam sebuah kelompok yang bersifat partisipatif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan dan menarik kesimpulan bahwa tim sepakbola city of heroes surabaya menggunakan pola komunikasi bintang yang dimana dalam kegiatan rapat atau diskusi bareng pemimpin seringkali menyampaikan informasi kegiatan latihan rutin akan yang dilakukan yang dimana dalam penyampaian itu anggota yang berada disitu dapat menyampaikan langsung informasi yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan tersebut dan anggota dapat memberikan saran oleh pemimpin. Hal ini jarang dilakukan oleh pemimpin dikarenakan tim sepakbola city of heroes surabaya jarang melakukan kegiatan rapat dan penyebaran informasi yang dilakukan lebih sering melalui media sosial WA.

KESIMPULAN

Dengan beberapa jenis tipe pola komunikasi diatas dan berdsarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan pola-pola komunikasi di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pola komunikasi organisasi yang dilakukan oleh pemimpin tim sepakbola city of heroes surabaya yaitu :

- a. Pola Komunikasi Roda
- b. Pola Komunikasi Rantai
- c. Pola Komunikasi Y, dan
- d. Pola Komunikasi Bintang.

Pola komunikasi tersebut yang sering dilakukan oleh pemimpin dan dinilai paling efektif untuk perkembangan tim sepakbola city of heroes surabaya. Tim sepak bola city of heroes tidak memiliki 1 fokus pola komunikasi dan pola komunikasi diatas merupakan pola yang biasa dilakukan oleh pemimpin city of heroes surabaya dan selama berjalannya waktu pola komunikasi diatas dinilai masi efektif diterapkan di tim sepakbola city of heroes surabaya.

REFERENSI

- Asmaningsih, Y. (2020). *POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DI KANTOR CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR* (Vol. 8, Issue 75). <https://doi.org/10.1016/J.Jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/J.Smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/Anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Darmawan, I. P. A., Sandi Utara, I. M. G., & Artiningsih, N. W. J. (2021). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Pengembangan Program Studi Filsafat Hindu STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 504-519. <https://doi.org/10.37329/Ganaya.V4i2.1353>
- Gori, F., & Simamora, P. R. (2020). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja

- Kepala Desa Marao Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(2), 115-122.
<https://Jurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Socialopinion/Article/View/773/680>
- Haruddin. (2018). *METODE ANALISIS DAN PENAFSIRAN DATA*. 1-15.
- Mendrofa, A. J., & Syafii, M. (2019). Pola Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Eksistensi Komunitas Marga Parna Di Kota Batam (Studi Kasus Komunitas Marga Parna Di Batu Aji Kota Batam). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1). [Http://E-Journal.Usd.Ac.Id/Index.Php/LLT%0Ahttp://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Jpdpb/Article/Viewfile/11345/10753%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Sbspro.2015.04.758%0Awww.Iosrjournals.Org](http://E-Journal.Usd.Ac.Id/Index.Php/LLT%0Ahttp://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Jpdpb/Article/Viewfile/11345/10753%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Sbspro.2015.04.758%0Awww.Iosrjournals.Org)
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, 17(33), 81-95.
<https://Doi.Org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>
- Salsabila Miftah Rezkia (2021) : Engenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data Induktif. Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Ana... (Dqlab.Id).
- Ujang Hadi Kusmanto, Nur Khalis, & Atik Risdiani. (2022). Pola Komunikasi Interpersonal Antara Kepala Sekolah Dan Guru Di Smp Negeri 6 Bandar Lampung Kota Bandarlampung. *Unisan Jurnal*, 1(3), 158-165. Retrieved From [Http://Journal.An-Nur.Ac.Id/Index.Php/Unisanjournal/Article/View/642](http://Journal.An-Nur.Ac.Id/Index.Php/Unisanjournal/Article/View/642)
- Tamimi, M., Budi Eko Soetjipto, Sopiah, S., & Kurniawan, D. T. . (2022). Budaya Organisasi Dan Kinerja Karyawan: : A Systematic Literature Review. *Husnayain Business Review*, 2(2), 11-21. <https://Doi.Org/10.54099/Hbr.V2i2.100>
- Fareza , D. O. ., & Subianto , A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kawasan Ampel Surabaya. *Public Sphere Review*, 1(2), 1-7.
<https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.30>
- M. Husni Tamrin, & Agus Wahyudi. (2018). Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Kkjsm). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 21(2), 79-86. <https://doi.org/10.30649/aamama.v21i2.85>



Pengelolaan Aset Wisata Telaga Soda dalam Peningkatan PADes di Desa Tangungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Mudhiatul Lailiyah¹, Deasy Ariefiani²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.62>

CORRESPONDENCE

E-mail: deasy.ariffiani@hangtuah.ac.id

KEYWORDS

Management, PADesa, Soda Lake,
Lamongan

ABSTRACT

Soda Lake Tourism is one of the village assets managed as a tourist spot made by Pokdarwis Kreasi Telaga Soda which was previously an ordinary pond. The purpose of this study is to describe and analyze the management of tourism assets in increasing the village's original income in Telaga Soda Tourism as well as the supporting factors and inhibiting factors in the management of Telaga Soda tourism. The method used is descriptive qualitative with the sources of information being the Head of the Tangungprigel Village, the Chairperson of the Pokdarwis of the Responsibility of Prigel Village, and visitors. Data collection technique using purposive sampling. This study uses indicators from Permendagri Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management. the results of the study indicate that the implementation of village asset management in Telaga Soda tourism in the Responsibility Prigel Village has been running in accordance with Permendagri Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management is the implementation of Utilization, Maintenance, Administration, Reporting and supervision. Indicators that have not gone well are the implementation of Planning, Guidance and Security. The suggestions are efforts to increase the competence of tourism managers through outreach, technical guidance, training education with competent speakers, collaborating with third parties for development in the management of Telaga Soda tourism. In developing Telaga Soda Tourism, the village government and Pokdarwis must be more open in seeing opportunities and changes in the tourism sector. In addition, tourism facilities and infrastructure such as accessibility, amenities and accommodation must always be improved and improved.

PENDAHULUAN

Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mendorong keleluasaan Desa, dengan memberikan berbagai kemandirian kepada pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka tugas yang diemban oleh pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang diberikan akan semakin berat dalam

penyelenggaraannya, oleh karena itu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri memiliki tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu fungsinya adalah perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang memuat kewenangan pemerintah desa untuk mengelola dan menggunakan aset desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa perangkat desa bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan desa. Dalam rangka mengelola aset desa yang nilainya tidak sedikit dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan Permendagri No. 1 Tahun 2016 sebagai model guna mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes).

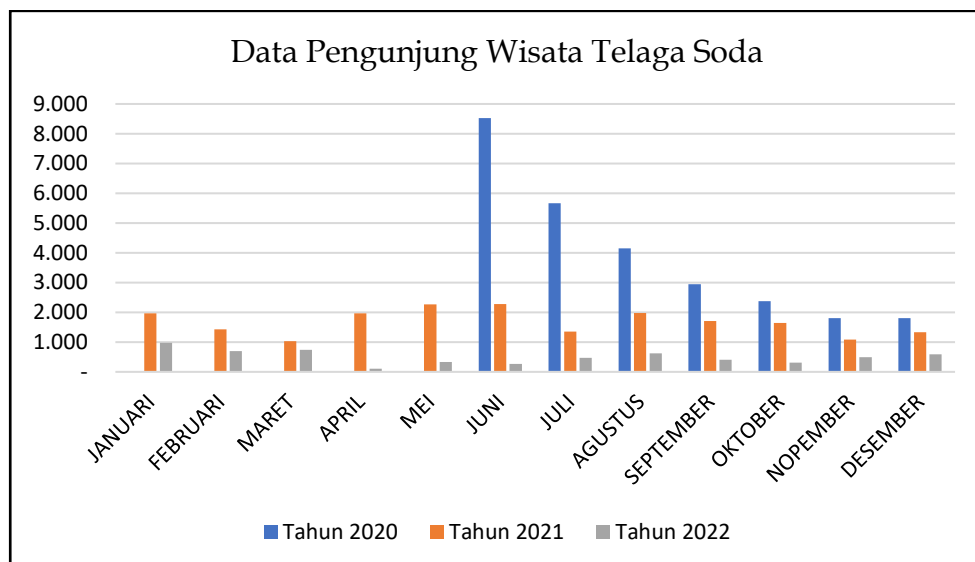
Menurut Shaila Naila Nadya (2022) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Tata cara pengelolaan aset desa sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dibahas oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset yaitu perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring.

Pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kontribusi devisa negara. Pemerintah Kabupaten atau Kota diwajibkan oleh Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 untuk merencanakan dan mengelola semua kegiatan yang terkait dengan pariwisata di daerah secara komprehensif, karena pemerintah daerah dengan prinsip otonomi ini dapat bersaing dan mengembangkan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan pelayanan, dan peran masyarakat.

Istilah "desa" mengacu pada unit geografis terkecil dan populasi negara atau bangsa yang paling mewakili keragaman Indonesia. "Wisata desa," juga dikenal sebagai "ekowisata," adalah strategi pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata dapat berlangsung di luar daerah perkotaan. Pada hakekatnya kegiatan pariwisata yang termasuk dalam kategori rural tourism harus mencakup tiga komponen mendasar: produk pariwisata itu sendiri, yang penciptaannya dapat dipengaruhi oleh faktor alam, budaya, dan buatan. Sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penyelenggara kegiatan (operator) dan ruang potensial untuk pengembangan interaksi yang lebih dalam antara wisatawan dan masyarakat serta lingkungan.

Secara geografis, Kota Lamongan termasuk salah satu kabupaten yang berada di pantai Jawa Timur sebelah utara dan setengah dari wilayah pesisirnya berupa perbukitan. Susunan ini ialah kelanjutan dari runtutan pegunungan kapur bagian utara. Di bagian tengahnya terdapat dataran rendah serta gelombang, dan 5 setengahnya tanah berawa. Pada bagian selatan ada pegunungan yang termasuk ujung timur dari pegunungan Kendeng Bengawan Solo. Dan di Kota Lamongan ini terdapat beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Glagah yang memiliki wisata Telaga Soda.

Wisata Telaga Soda merupakan salah satu aset desa yang dikelola sebagai tempat wisata buatan oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kreasi Telaga Soda yang sebelumnya berupa tambak biasa. Nama dari wisata ini "Soda" merupakan singkatan dari Sogoh Dayoh yang dalam bahasa Indonesia artinya menjamu tamu, karena setiap ada tamu yang datang ke desa ini, seringkali dijamu dengan ikan hasil dari tambak desa ini. Wisata ini meskipun terbilang sangat baru namun pengunjung yang datang ke tempat wisata bisa dikatakan cukup banyak, dan tidak heran jika pengunjung yang datang ke wisata tersebut cukup banyak. Karena pihak wisata memanfaatkan berbagai media tersebut untuk komunikasi pemasarannya, adapun data pengunjung pada tahun 2020-2022 bisa dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Jumlah Pengunjung Wisata Telaga Soda Tahun 2020-2023

Sumber: diolah oleh penulis, (2023)

Berdasarkan gambar 1 diatas tentang jumlah pengunjung wisata Telaga Soda Tahun 2020-2022 dari Sekretaris Pokdarwis, dilihat berdasarkan data pengunjung wisatawan mengalami penurunan setiap tahunnya, Telaga Soda yang termasuk Destinasi Wisata baru belum mengalami peningkatan pengunjung yang sangat signifikan. Upaya mengelola potensi desa yang mampu menyongkong pendapatan desa mulai dirintis oleh pemerintahan dan masyarakat Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, salah satunya melalui pemanfaatan sektor pariwisata yaitu Telaga Soda. Sejak tahun 2020 saat dibukanya obyek wisata tersebut terjadi peningkatan jumlah wisatawan ke Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa dari sumber wisata ini. Kontribusi

aktivitas wisata Telaga Soda terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Wisata Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kontribusi pendapatan Wisata Telaga Soda terhadap pendapatan asli desa di Desa Tanggungprigel

Tahun	PADesa		Jumlah Kontribusi Wisata Terhadap PADesa	
	Rp	Perubahan %	Rp	%
2019	304.900.000	0	-	-
2020	494.603.600	62	277.203.600	56
2021	517.647.400	5	200.247.400	39
2022	150.223.000	-71	60.223.000	40

Sumber: Pendapatan Asli Desa Tanggungprigel (2022).

Berdasarkan tabel 1. PADesa Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dijelaskan bahwa adanya fluktuasi kontribusi sektor wisata terhadap Pendapatan Asli Desa. Pada tahun 2020 kontribusi destinasi wisata sebesar 56% terhadap PADesa, pada tahun 2021 kontribusi destinasi wisata sebesar 39%, dan pada tahun 2022 kontribusi destinasi wisata sebesar 40%. Pendapatan dana kontribusi wisata hanya diperoleh pada fasilitas yang ada seperti waterball, perahu bebek dan biaya parkir. Kontribusi wisata Telaga Soda setiap tahunnya mengalami penurunan yang disebabkan oleh sepi pengunjung. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu pengunjung yang datang ke wisata Telaga Soda bahwa pengunjung sudah mulai bosan dengan wisata dan wahana yang itu-itu saja. Dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa potensi sumber pendanaan dari sektor wisata di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan masih dapat ditingkatkan. Selain itu, aktivitas ekonomi pendukung kegiatan wisata masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan pada akhirnya memberi kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Sumber PADesa pada Desa Tanggungprigel selain dari kontribusi wisata juga terdapat sumber dari dana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti

dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Adapun sumber data dari penelitian tersebut terdiri dari data primer dengan jumlah 5 orang informan dan data sekunder dengan beberapa macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Desa Pada Wisata Telaga Soda

Pengelolaan aset desa mengacu pada prosedur, tindakan, atau strategi yang digunakan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu tugas. Pelaksanaan teknis harus menitik beratkan pada pembentukan dan penciptaan kegiatan-kegiatan penunjang/pendukung yang efisien, efektif, dan saling bermanfaat sehingga keberadaannya memberikan manfaat yang setara dengan besarnya bagi keberadaan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan aset desa dilakukan sesuai dengan prinsip kepraktisan, kejelasan hukum, keterbukaan dan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun penjelasan mengenai tahap-tahap pengelolaan yakni:

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan wisata Telaga Soda yaitu dengan melakukan pengalokasian anggaran yang akan dipakai terlebih dahulu. Perencanaannya mudah, yang mengharuskan komponen rencana diatur secara sistematis, prioritasnya jelas, dan tugas-tugas pentingnya tercakup. Dalam perencanaan kebutuhan barang dilakukan secara otonomi dengan melakukan musyawarah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam perencanaan kebutuhan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan aturan mengenai perencanaan aset desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Dalam proses perencanaan pengelolaan wisata Telaga Soda belum berjalan dengan optimal yang sesuai dengan sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dimana perencanaan kebutuhan barang wisata tersebut telah melalui forum musyawarah dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Perencanaan tertuang dalam RKPDes dan dilakukan penjabaran dalam RPJMDes. Namun dalam RPJM Desa Tanggungprigel tidak secara spesifik khusus untuk wisata. Dalam hal ini Pemerintah Desa telah melakukan secara efektif untuk tahap perencanaan pengelolaan aset desa pada sektor wisata. Yang dimana Pemerintah Desa bersama dengan seluruh stakeholder (BUMDes dan Pokdarwis) untuk melakukan musyawarah dalam merencanakan kebutuhan yang dibutuhkan wisata Telaga Soda, dan perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa dan dana yang dikeluarkan dialokasikan ke APBDesa. Namun pada pelaksanaan perencanaan untuk pengembangan wisata Telaga Soda mengalami hambatan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanggungprigel bahwa dalam perencanaan pengembangan wisata Telaga Soda Pemerintah Desa Tanggungprigel mengalami hambatan anggaran. Yang mana dalam perencanaan pengembangan wisata tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dan pendapatan dari wisata Telaga Soda dari tahun ketahun mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan wisatawan.

Pemanfaatan

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menghasilkan pendapatan berupa uang, dan memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat. Seluruh pendapatan yang diterima dalam bentuk uang merupakan hasil dari pendapatan asli desa yang harus segera disetorkan ke kas desa sebelum digunakan untuk kegiatan belanja daerah melalui APBDesa secara berkelanjutan.

Pasal 11 ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menggaris bawahi bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilaksanakan sepanjang tidak dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi ini, penggunaan sumber daya desa dapat dibatasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, baik pemerintah desa maupun masyarakat desa menggunakan sumber daya desa yang sudah ada.

Dalam pemasukan pendapatan wisata Telaga Soda diperoleh dari wahana, jualan, dan parkir. Wisata Telaga Soda tidak dikenakan biaya atau tiket masuk. Wisata Telaga Soda selain dimanfaatkan untuk pengunjung berwisata juga dimanfaatkan sebagai tempat permainan Outbound dan juga sebagai tempat edukasi bagi petani dalam budidaya ikan. Pemerintah Desa Tanggungprigel dan pengelola wisata yaitu Pokdarwis sudah memanfaatkan wisata secara maksimal. Dengan cara apa yang dibutuhkan pengunjung untuk bermain pihak Pokdarwis langsung membuat permainan Outbound untuk menarik wisatawan khususnya pada playground anak-anak. Selain itu Pemerintah Desa Tanggungprigel juga memanfaatkan telaga untuk budidaya ikan yang mana budidaya tersebut akan menjadi contoh atau tempat edukasi untuk petani sekitar dalam pengelolaan ikan. Setelah adanya Covid-19 jumlah pendapatan dari wisata Telaga Soda menurun dan saat ini pihak pemerintah desa memanfaatkan warkop Soda yang ada di wisata untuk pendapatan yang akan digunakan sebagai pengembangan wisata.

Pengamanan

Pengamanan terhadap aset desa sangat wajib dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjaga aset yang dimiliki. Pengaman bisa berupa perlindungan fisik terhadap aset desa untuk menjamin keamanan aset masyarakat. Dalam melindungi pengamanan aset yang dimiliki juga membutuhkan marka batas (batasan wilayah) atau pagar guna melindungi tanah dan bangunan secara fisik. Dalam pengamanan aset desa juga bisa dengan

perlindungan hukum dan status barang bukti atas kepemilikan aset. Pengamanan juga bisa berupa membayar pajak tanah tiap tahun dalam perlindungan aset yang dimiliki.

pengamanan fisik terhadap wisata Telaga Soda sudah baik. Yang mana wisata Telaga Soda sudah memiliki batas antara wilayah tambak warga dengan wisata dan pagar dalam melindungi wisata Telaga Soda. Pihak Pokdarwis juga sudah melakukan pelengsengan telaga agar tanah tersebut tidak longsor karena telaga juga ada budidaya ikan yang mengakibatkan tanah itu teriris. Pemerintah Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan juga sudah melakukan perlindungan hukum dengan cara membayar Pajak Bumi setiap tahunnya dan biaya dibebankan pada APBDesa. Namun wisata Telaga Soda belum mempunyai sertifikat kepemilikan secara perlindungan hukum dikarenakan dana yang dimiliki masih kurang. Pengaman yang dilakukan pemerintah Desa Tanggungprigel dan pengelola wisata masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 19 huruf c dan d dalam mencegah terjadinya penurunan fungsi dan pengamanan secara fisik dan hukum.

Pemeliharaan

Pemeliharaan aset desa harus dijaga oleh kepala desa dan perangkat desa. Dengan perawatan yang dilakukan kepada aset desa membutuhkan sumber daya anggaran yang signifikan. Anggaran biaya tersebut diambil dari APBDesa.

Pemeliharaan terhadap wisata Telaga Soda sudah dilakukan dengan baik. Pengelola wisata Telaga Soda yaitu Pokdarwis sudah melakukan pemeliharaan rutin dengan 1 minggu sekali untuk menjamin sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi baik dan siap digunakan wisatawan. Dalam pemeliharaan wisata Telaga Soda pemerintah Desa Tanggungprigel mengambil anggaran dari APBDesa setiap tahunnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 20 yang mana pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f yang wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Penatausahaan

Pengelolaan aset desa harus memiliki pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sebelum berlanjut ke tahap pelaporan. Pertanggungjawaban atau pelaporan selalu dilakukan atas setiap kegiatan yang dilakukan dalam pembukuan ini. Dalam hal ini, penulis memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana suatu pemerintahan desa dimasukkan ke dalam pelaporan (pertanggungjawaban) sesuai dengan proses yang digunakan oleh pemerintah Desa Tanggungprigel.

Dalam proses penatausahaan sudah dilakukan secara baik. Pemerintah Desa Tanggungprigel melakukan penatausahaan dengan menginventarisasikan aset yang dimiliki wisata. Dalam inventarisasi tersebut juga sudah diberikan kodefikasi. Pemerintah Desa Tanggungprigel juga melakukan pembukuan dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada pasal 28 ayat 1 aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada pasal 10 harus

diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban melibatkan pelaporan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset desa terintegrasi dengan sistem ini. Untuk cara mengenai laporan pertanggungjawaban, dilihat dari Peraturan LPJ APBDesa Pengelolaan Keuangan Desa RI Nomor 113 Tahun 2014, yang dibuat Kepala Desa dengan dibantu Sekretaris Desa. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LPJ) kepada Bupati/Walikota biasanya diselesaikan pada setiap akhir tahun anggaran. Jika LPJ belum dibuat atau diselesaikan akan menyebabkan terhambatnya penyaluran anggaran tahun berikutnya sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini juga akan berdampak pada apakah gaji/pendapatan tetap kepala desa, perangkat desa, atau badan desa telah dibayarkan (BPD). Setiap empat bulan sepanjang tahun, proses laporan pertanggungjawaban diselesaikan, dan diselesaikan pada akhir tahun untuk memutuskan APBDesa tahun berikutnya.

Pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa Tanggungprigel dan pihak pengelolaan wisata. Setiap bulan pihak pengelola yaitu Pokdarwis melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan dari pihak pemerintah Desa Tanggungprigel melaporkan laporan pertanggungjawaban aset desa ke Kabupaten Lamongan. Pelaporan keuangan desa memberikan rincian yang relevan tentang situasi keuangan desa dan semua transaksi.

Pembinaan

Dalam setiap usaha ataupun perusahaan yang saat ini sudah banyak tentu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang hebat. Produktivitas SDM harus ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan suatu usaha. Untuk itu, program pelatihan atau pembinaan dan pengembangan SDM harus dilaksanakan agar dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Pelatihan SDM atau pembinaan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu usaha ataupun organisasi. SDM yang berkualitas akan membantu untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan.

Pembinaan terhadap pengelola wisata Telaga Soda telah dilakukan namun masih belum tepat sasaran. Pemerintah Desa Tanggungprigel sudah melakukan pembinaan terhadap pengelola wisata dan juga dari pemerintah Kabupaten Lamongan sudah memberi pembinaan ke pengelola-pengelola wisata yang ada di Kota Lamongan. Pihak pengelola wisata yaitu Pokdarwis juga ikut di acara pembinaan seminar yang lain untuk menambah ilmu atau bekal dalam membuat desa wisata yang baik dan benar sesuai prosedur. Namun pembinaan yang telah dilakukan Pemerintah Desa Tanggungprigel kepada Pengelola Wisata Telaga Soda belum mencapai tujuan tersebut. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengelola

Wisata Telaga Soda masih terdapat SDM atau anggota pengelola yang kurang mengerti tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan pelaksanaan semua tindakan organisasi untuk menjamin bahwa segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana perencanaan dan pengendalian memiliki hubungan yang erat. Pengawasan untuk mencegah inkonsistensi dalam perencanaan dan pengelolaan aset milik desa, banyak pihak yang bekerja sama untuk mengontrol dan mengawasi aset desa.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa Tanggungprigel dalam mencegah inkonsistensi dalam pengelolaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dengan cara mengadakan rapat pertemuan untuk membahas perencanaan dan evaluasi dalam pengelolaan wisata Telaga Soda dan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengawasan wisata Telaga Soda adalah kepala unit wisata yaitu ketua Pokdarwis. Untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan atau pengelolaan pelaporan, proses pemantauan merupakan tonggak penting dalam perencanaan pengelolaan aset desa. Pengguna barang, memantau, dan mengontrol bagaimana properti desa digunakan, dimanfaatkan, dialihkan, dikelola, dipelihara, dan diamankan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang sejalan dengan pengendalian intern pemerintah desa mencakup pengawasan/pemantauan terus menerus, evaluasi tersendiri, dan tindak lanjut atas saran hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa pada sektor wisata Telaga Soda di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang sudah berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa adalah pada pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pembinaan dan pengawasan. Namun ada satu pelaksanaan yang belum berjalan dengan baik yaitu pada pelaksanaan Pengamanan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aset Wisata Telaga Soda dalam peningkatan pendapatan asli desa di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan aset Wisata Telaga Soda dalam peningkatan pendapatan asli desa di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, berdasarkan dari hasil wawancara diketahui bahwa: 1) Pengembangan Wisata Telaga Soda yang masih belum berjalan dengan baik karena kendala biaya dan juga tanah pada Wisata Telaga Soda masih belum disertifikasi dalam perlindungan hukum karena kendala biaya yang memerlukan anggaran yang cukup besar. 2) Kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang baik dari pengurus aset desa maupun tim pengelola wisata (Pokdarwis).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa pengelolaan aset desa pada wisata Telaga Soda di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yaitu pada rangkaian kegiatan pengelolaan pada tahap indikator pemanfaatan, penatausahaan, pelaporan, pemeliharaan, dan pengawasan sudah dijalankan sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa. Namun ada 3 indikator yang masih belum berjalan dengan baik yaitu pada tahap perencanaan, pembinaan dan pengamanan.

Terdapat faktor yang menjadi penghambat pengelolaan wisata Telaga Soda Desa Tanggungprigel yaitu 1) Dana, Pemerintah Desa Tanggungprigel masih kekurangan anggaran dana dalam pengembangan dan pengelolaan wisata Telaga Soda, 2) Kompetensi SDM yang masih kurang baik dari pengurus aset desa maupun tim pengelola wisata (Pokdarwis). Sedangkan yang menjadi faktor pendukung wisata Telaga Soda yaitu pada keindahan alam yang sangat unik karena wisata tersebut berada ditengah-tengah persawahan tambak masyarakat Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Kontribusi yang diberikan wisata Telaga Soda tahun 2020 sebesar 56%, tahun 2021 sebesar 39%, tahun 2022 sebesar 40%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2022. Berdasarkan hasil presentase tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pendapatan wisata Telaga Soda sudah berperan terhadap Pendapatan Asli Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan walaupun dari tahu ke tahun mengalami penurunan

REFERENSI

- Angg. (15 C.E.). Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, Dan Berdaulat. [Www.Kominfo.Go.Id.HttPs://Www.Kominfo.Go.Id/Index.Php/Content/Detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/Infografis](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/Infografis)
- D. Alita, S. Priyanta, And N. R. 2019. (2014). Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat. *Journal Of Chemical Information*, 53(9), 1689-1699.
- Dilahir, D. (2016). Geografi Desa Dan Pengertian Desa. *Forum Geografi*, 8(2), 119. [HttPs://Doi.Org/10.23917/Forgeo.V8i2.4826](https://doi.org/10.23917/Forgeo.V8i2.4826)
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 001-008. [HttPs://Doi.Org/10.37641/Jiakes.V6i1.58](https://doi.org/10.37641/Jiakes.V6i1.58)
- Hermawan, M. K. (2016). Pengelolaan Aset Desa Dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian Tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Cenang Dang Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol 8, 1-19. [HttPs://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jpgs/Article/View/22612](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22612)
- Humas. (2022). Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 Dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022. [HttPs://Setkab.Go.Id](https://setkab.go.id). [HttPs://Setkab.Go.Id/Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2021-Dan-Prioritas-Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2022](https://setkab.go.id/Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2021-Dan-Prioritas-Pemanfaatan-Dana-Desa-Tahun-2022)
- Iriyani, S. (2020). Analisis Laporan Pengelolaan Aset Desa Pada Desa Sawangaoha Kabupaten Kolaka Utara. *Kaos Gl Dergisi*, 8(75), 147-154. [HttPs://Doi.Org/10.1016/J.Jnc.2020.125798](https://doi.org/10.1016/J.Jnc.2020.125798) [HttPs://Doi.Org/10.1016/J.Smr.2020.02.002](https://doi.org/10.1016/J.Smr.2020.02.002) [HttP://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/810049](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049) [HttP://Doi.Wiley.Com/1](http://doi.wiley.com/1)

- 0.1002/Anie.197505391%0ahttp://Www.Sciencedirect.Com/Science/Article/Pii/B9780857090409500205%0ahttp:
Lamongantourism.Com. (2019). Telaga Soda. [Https://Lamongantourism.Com. Https://Lamongantourism.Com/Destination/Telaga-Soda/](https://Lamongantourism.Com/Https://Lamongantourism.Com/Destination/Telaga-Soda/)
- Menteri Dalam Negeri RI. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. In *Nature Methods* (Vol. 7, Issue 6, P. 2016). <Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/26849997%0Ahttp://Doi.Wiley.Com/10.1111/Jne.12374>
- Mudaj, B. B. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Di Desa Hokeng Jaya Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur.
- Natasya, S. N. (2020). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. 1449–1461.
- Nursiam, L. P. &. (2016). Pengelolaan Aset Desa Untuk Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas. 1.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <Https://Doi.Org/1>
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
- Setiyastuti, N. (2016). Pengelolaan Aset Desa (Suatu Kajian Tentang Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Cacaban Kidul , Kecamatan Bener , Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah) Pembangunan Masyarakat Desa “ AP



Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kota Surabaya

Aprilliana Rahmani¹, Mas Roro Lilik Ekowanti²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.82>

CORRESPONDENCE

E-mail: lilik.ekowanti@hangtuah.ac.id

KEYWORDS

Implementation, Public policy, PTSL

ABSTRACT

The government has conducted the program of systematic and complete land registration (PTSL) in order to have a legal certainty guarantee and protection of human rights in owning land fairly and evenly, as well as to encourage the state economic growth generally and the community economy in Indonesia. The registration system is regulated by the Ministry of Agrarian and Spatial/ the head of BPN No.12 in the Year 2017 regarding the acceleration of systematic and complete land registration. The study examines the implementation of the PTSL program in Surabaya. This is a literature study that describes and analyzes by using policy implementation theory in George C. Edward III. The variables are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results explain that Surabaya has conducted a PTSL program which is begun from 2017 to recent years. The program continues to be carried out, so that the implementation of PTSL program in Surabaya has been done properly. The supporting factors in PTSL implementation re communication, i.e. the definite program, and bureaucratic structure in Standard Operating Procedure (SOP). Whereas, the inhibiting factors are the human resources, for example, the staff, budget, and the information. In addition, human resource is the most inhibiting factor in the process of PTSL implementation in Surabaya. The study also suggests that it is important to have management information system in land registration for supporting PTSL implementation.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materiil maupun spiritual (Afandi & Warjio, 2015). Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan.

Hukum kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No 5 Tahun 1960 tentang perturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya terdapat suatu konsepsi hukum tanah nasional dimana semua tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah milik bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga supaya jangan sampai timbul masalah atau sengketa atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk mengetahui proses implementasi program tersebut penulis tertarik mengambil Studi Literatur dengan judul Implementasi Program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL) dengan beberapa yang didasari oleh fakta dokumen dan review jurnal yang relevan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Pencapaian keberhasilan implementasi dapat diukur dengan faktor komunikasi salah satunya dalam hal ini implementasi program PTSL yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS300/2018 tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya: a) waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik; b) mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan; c) dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan; d) dapat sekaligus diketahui bidang- bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan; e) persetujuan batas sebelah menyebelah (asas *contradictoire delimitatie*) relative lebih mudah dilaksanakan; f) dapat memperbaiki/ melengkapi peta dasar pendaftaran.

Agar Pelaksanaan PTSL dapat berlangsung secara efiseiensi dan efektif, maka Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap, Kepala Kantor Wilayah BPN

dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.

Dengan demikian untuk mengetahui proses implementasi program tersebut penulis tertarik mengambil Studi Literatur dengan judul Implementasi Program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL) dengan beberapa yang didasari oleh fakta dokumen dan review jurnal yang relevan. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Surabaya?” dan “Apa faktor penghambat dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Surabaya?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Surabaya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Surabaya.

METODE

Bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah proses pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan dengan jenis studi literatur Studi Literatur Penelitian kepustakaan dan studi pustaka/riset pustaka meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012). Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut (Zed, 2014), pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Meskipun terlihat mudah, studi literatur membutuhkan ketekunan yang tinggi agar data dan analisis data serta kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik review dan analisis. Analisis itu sendiri berupa proses mempelajari atau memeriksa sesuatu dengan cara yang terorganisir untuk mengetahui tentang pengimplementasian program sedangkan review sebagai survei terkait implementasi program PTSL. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Dapat dilihat dari Komunikasi sangat mendukung di dalam penerapan program PTSL, konsistensi program menjadikan proses pengimplementasian program berjalan dengan sesuai tujuan serta terlaksana dengan baik adapun, kejelasan kelompok sasaran juga salah satu penyebab keberhasilan dalam implementasi program PTSL di Kota Surabaya, Konsistensi dalam pengerjaan program tersebut juga berdampak baik serta sudah dilaksanakan sehingga para penerima kebijakan yaitu sebagian masyarakat Kota Surabaya telah menerima sertifikat. Dalam rangkai pengimplementasian program PTSL di Kota Surabaya BPN sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Selasa, 2 April 2019, bertempat di Balai Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Pengadilan agama memberitahukan bahwa sosialisasi dalam rangka sidang terpadu percepatan pengurusan penetapan ahli waris oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) I Surabaya bekerja sama dengan Pengadilan Agama Surabaya, tujuan kegiatan tersebut untuk membantu masyarakat melengkapi dokumen permohonan sertifikat melalui pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding pada tanggal 1 Maret 2019 yang lalu.

Sumber Daya

Penulis juga melihat variabel Sumberdaya dimana dalam prosesnya variabel ini berdampak besar terhadap pencapaian target. Dapat dilihat dari Fasilitas, Staff dan Informasi menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam pengimplementasian program tersebut penerepan di Kota Surabaya masih kurang dalam hal ini karen banyaknya masyarakat yang masih mengeluhkan tentang kasus pertanahan yang dirasa masih kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Aspek penyelenggaraan pelayanan PTSL yang lain adalah Sumber Daya pelaksana di BPN yang terdiri dari manusia dan non manusia berikut adalah paparan dari penelitian terdahulu mengenai variabel sumber daya :

Fasilitas

Dari paparan diatas mengenai variabel Sumber Daya Manusia maupun non manusia bisa dilihat bahwa dalam pengimlementasiannya di Kota Surabaya kategori program di BPN Kota Surabaya II tahun 2018. Capaian target yang harus di realisasikan yaitu 20.000 bidang dan anggaran Rp. 6.307.700.000,- Adapun pencapaian Fisik Produk K1 (Sertipikat) 10.217 bidang. Produk K3 (Peta bidang) 9.783 bidang. Dan pencapaian keuangan mencapai Rp. 5.175.160.375,- (82%) data tersebut berupa anggaran serta fasilitas yang sudah diberikan BPN Kota Surabaya II kepada masyarakat. (sumber : data internal BPN Surabaya II 2018)

Staff

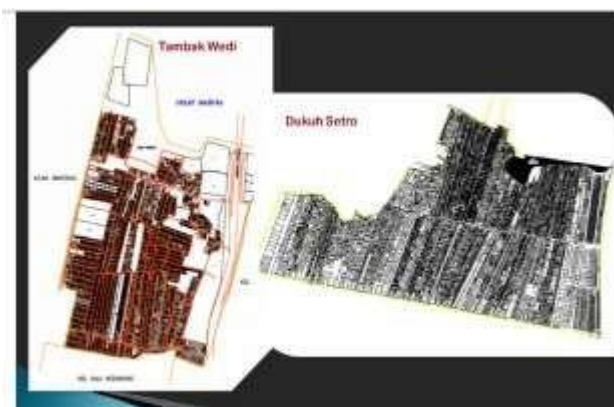
Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tentang susunan panitia adjudikasi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Kota Surabaya II tahun 2018 antara lain Ketua Panitia merangkap

anggota, yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan; b. wakil ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan; c. wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan; d. sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan; e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan f. anggota dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai dengan kebutuhan.

Sistem Informasi Manajemen

Manajemen modern mengharuskan manajer untuk memelihara informasi baru dan /atau sistem akuntansi untuk mendukung dan mempertahankan keputusan mereka. Pengelolaan lahan tidak berbeda, dan pengelola/administrator lahan harus memelihara "register" tanah (atau lebih tepatnya catatan tanah). Istilah daftar tanah digunakan di sini dalam konteks live inventarisasi lengkap sumber daya. Telah ditetapkan bahwa pemikiran saat ini tentang pengelolaan informasi pertanahan cenderung ke arah "kadaster multiguna" atau terintegrasi sistem informasi pertanahan dengan sub-sistem yang sesuai untuk penguasaan lahan, pengumpulan pendapatan, dan administrasi umum. Jika sistemnya dirancang sebagai sub- sistem yang terintegrasi, berbagai bagian negara dapat memberikan penekanan lebih besar pada fungsi yang berbeda (FIG, 1998).

Penulis menemukan tentang bentuk informasi yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen pertanahan Standar akurasi untuk peta indeks tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai tanah, sifat dan jumlah transaksi yang diharapkan, atau tingkat pendidikan praktisi atau pengguna. Harus diingat bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah untuk menggambarkan struktur topologi kepemilikan tanah dan menyediakan pengindeksan dan referensi silang antara lokasi tanah dan catatan dalam database dimana di negara afrika juga menerapkan sistem informasi manajemen. (Kain, R.J.P. and Baigent E. 1993), Berkaitan dengan sistem pertanahan, sesi identifikasi tanah, mengidentifikasi menggunakan GPS, Foto Udara, Citra satelit (resolusi besar) dan video. Peta sketsa juga digunakan dalam metode pengukuran tanah, metode ini harus digunakan dikarenakan efektivitas dalam pengukuran tanah.



Gambar 1. Potret wilayah
Sumber : BPN Kota Surabaya II

Pada gambar 1 yaitu pengambilan gambar peta didaerah surabaya dari jarak jauh menggunakan teknologi sehingga seharusnya sistem informasi manajemen perlu untuk dilakukan di surabaya. Dengan hal tersebut umunya untuk keberhasilan implementasi program PTSL serta perlu dikelola lebih tertib bisa memetakan tanah mana yang terdaftar maupun yang belum terdaftar sehingga untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih sertifikat atau kepemilikan ganda sertifikat.

Disposisi

Disposisi para implementator program PTSL di Kota Surabaya dapat dilihat dari pengangkatan birokrasi dimana dalam hal ini peran dari BPN Kota Surabaya II sudah melaksanakan didalam pelaksanaan program PTSL yang dilakukan setiap tahunnya dengan pembagian beberapa tim pelaksana yang dibagi oleh pihak pihak yang ada di BPN Kota Surabaya II.

Proses implementasi dalam pengangkatan birokrasi untuk program PTSL di BPN II Kota Surabaya dalam penerapannya diangkat sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi masing masing, dalam hal ini Imam selaku ketua pelaksana program PTSL di BPN kota Surabaya II menyatakan bahwa pengerjaan program PTSL dikerjakan secara bertahap tergantung kelurahan dan kecamatan yang dituju berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, setiap tahunnya para pelaksana dibagi menjadi tim dan mempunyai ketua tim masing masing.

Imam menyatakan bahwa dalam proses implementasi di pengangkatan birokrasi setiap pemilihan anggota pelaksana program PTSL dilakukan setiap tahun dipilih melalui ketua BPN II Kota Surabaya, pengangkatan Birokrasi dilakukan setiap tahun dengan sasaran yang berbeda sehingga setiap tahunnya anggota pelaksana Program PTSL selalu berbeda sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi masing masing anggota. Bahwa pengerjaan program PTSL dikerjakan secara bertahap, oleh karena itu, setiap tahunnya para pelaksana dibagi menjadi tim.

Struktur Birokrasi

Dapat dilihat Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan program PTSL di Kota Surabaya yaitu bisa dilihat dari Standart Operational Prosedure (SOP) BPN kota SurabayaII sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam peraturan menteri sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah dalam program yang dilaksanakan khususnya di Kota Surabaya. Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa faktor sumberdaya yaitu informasi maka penulis menemukan untuk pengimplementasian bisa berhasil yaitu perlu ditambahkannya Sistem Informasi Manajemen yang mana penerapan ini sudah dilakukan oleh beberapa negara Negara maju untuk menaggulangi adanya permasalahan tanah seperti sengketa tanah, kepemilikan tanah ganda , menempati lahan orang lain untuk memilimanisir tentang kasus kasus tersebut menurut (Kain, R.J.P. and Baigent E. 1993) SIM bisa digunakan dimana dalam penerapannya bisa digunakan sebagai sesi identifikasi tanah , mengidentifikasi menggunakan GPS, Foto Udara, Citra satelit (resolusi besar) dan video.

Seharusnya sistem informasi manajemen perlu untuk dilakukan di Surabaya yang meliputi: input database menuju digitalisasi sebagai backup data manual kemudian dipetakan dengan menggunakan Geografi Informasi Sistem (GIS), pengindraan jarak jauh. Dengan hal tersebut umumnya untuk keberhasilan implementasi program PTSL serta perlu dikelola lebih tertib bisa memetakan tanah mana yang terdaftar maupun yang belum terdaftar sehingga untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih sertifikat atau kepemilikan ganda sertifikat. Peta sketsa juga digunakan dalam metode pengukuran tanah, metode ini perlu digunakan agar bisa memetakan lebih khususnya Surabaya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan dalam implementasi program PTSL di Kota Surabaya dapat dilihat dari faktor faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat pengimplementasian program maka, dalam hal tersebut ada beberapa yang akan diuraikan sebagai berikut.

Kota Surabaya sudah menerapkan Implementasi program PTSL dalam pelaksanaan program PTSL tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dalam program tersebut. Adapun faktor faktor pendukung dalam implementasi program PTSL di Kota Surabaya yaitu bisa dilihat dari faktor Komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi dimana dalam kegiatan pelaksanaan program PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri.

Implementasi program PTSL yang dilaksanakan di Kota Surabaya juga mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya yaitu faktor penghambat antara lain dapat dilihat dari faktor Sumberdaya serta kurangnya informasi terkait pemetaan bidang tanah dimana di Kota Surabaya mengalami kendala dimana SDM pembuatan sertifikat tanah oleh Pemkot Surabaya melalui program Sertipikatkan Surabaya (SS) masih banyak mengalami kendala. Radar Surabaya, 31 Januari 2020 memberitakan bahwa Program yang juga berbenturan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terkendala, karena jumlah tenaga di Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surabaya. Bahwa minimnya petugas juru ukur di ATR/BPN yang menjadi salah satu penghambat program SS belum bisa terselesaikan secara menyeluruh. Diperkirakan, program yang digagas mulai 2016 tersebut masih tersisa ribuan bidang milik warga Surabaya yang belum beres.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan proses program implementasi PTSL berjalan dan terlaksana dengan baik, semua indikator yang dijelaskan oleh George Edward III semua berpengaruh dalam proses implementasi program PTSL di Kota Surabaya; 2) Faktor pendukung dalam implementasi program PTSL di Kota Surabaya adalah Komunikasi, diantaranya kejelasan Program, dan Struktur Birokrasi yaitu Standar Operational Procedure (SOP). Sedangkan, Faktor yang paling menghambat adalah faktor yang paling menghambat adalah Sumber daya diantaranya staff, anggaran dan informasi dan faktor sumber daya manusia merupakan faktor penghambat paling besar di dalam proses implementasi program PTSL di Kota Surabaya, selain itu perlu adanya sistem informasi

manajemen pertanahan di kota Surabaya guna untuk mendukung pengimplementasian program PTSL; 3) Penulis juga menemukan variabel bentuk informasi yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen pertanahan Standar akurasi untuk peta indeks tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai tanah, sifat dan jumlah transaksi yang diharapkan, atau tingkat pendidikan praktisi atau pengguna. Harus diingat bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah untuk menggambarkan struktur topologi kepemilikan tanah dan menyediakan pengindeksan dan referensi silang antara lokasi tanah dan catatan dalam database dimana di negara afrika juga menerpakan system informasi manajemen. Berkaitan dengan sistem pertanahan, sesi identifikasi tanah , mengidentifikasi menggunakan GPS, Foto Udara, Citra satelit (resolusi besar) dan video. Peta sketsa juga digunakan dalam metode pengukuran tanah, metode ini.

Saran

Penulis memberikan rekomendasi kepada BPN Kota Surabaya II dalam pelaksanaan implementasi PTSL supaya memberikan informasi yang berupa sistem informasi manajemen dimana penggunaan sistem tersebut meminimalisir terjadinya kasus pertanahan yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam program implementasi indikator sistem informasi manajemen seharusnya masuk kedalam indikator sumberdaya sehingga indikator bisa menjawab permasalahan yang ada di dalam proses implementasi program PTSL dengan tepat. referensi silang antara lokasi tanah dan catatan dalam database dimana di negara afrika juga menerpakan sistem informasi manajemen. Berkaitan dengan sistem pertanahan, sesi identifikasi tanah, mengidentifikasi menggunakan GPS, Foto Udara, Citra satelit (resolusi besar) dan video. Peta sketsa juga digunakan dalam metode pengukuran tanah, dan metode tersebut bisa diterapkan di program PTSL di kota Surabaya.

REFERENSI

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Buntut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).
- Ashari, Taufik Imam. 2018. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan. Universitas Lampung
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- FIG (1998). *FIG Statement on the Cadastre*. Copenhagen, FIG.
- Hidayat, Asep dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
- Hikmah, Nur dkk. 2019. Implementasi Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kismoyo, Kecamatan

- Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Jurnal ilmu ilmu sosial. Universitas Slamet Riyadi di Surakarta, Indonesia.
- Hogwood, Bryan W., and Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for The Real World*. New York: Oxford University Press.
- Howlett, Michael and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford : Oxford University Press.
- [http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatanpendaftaran tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx/](http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatanpendaftaran_tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx/) (diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 WIB)
- [https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr) (diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 10.00 WIB)
- <https://www.pa-surabaya.go.id/Sosialisasi-BPN> (diakses pada tanggal 22 Juni pukul 08.00 WIB)
- Jogiyanto, H.M., 2003, *Sistem Teknologi Informasi*, ANDI Yogyakarta Indonesia
- Jones, Charles O. (1984) *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press
- Kain, R. J. P. and E. Baigent (1993). *The Cadastral Map in the Service of the State: A History of Property Mapping*. Chicago, University Of Chicago Press.
- Khairi, Alfi. 2018. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017). *JOM FISIP*. Vol 2.
- Lamb, Tony. 2016. *Systematic Property Registration: Risks and Remedies*. Lengkap Di Kota Bandung. *Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Librasti, Chika Zafa Librasti dkk. 2019. Implementasi Program Sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. *Jurnal Publicuho*. Vol 3. No. 1 2020. Universitas Halu Oleo
- Mirza, Toni. 2019. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*. Vol 4. No 2. STIA & P ADS Palembang.
- Nadeak, Tongam. 2018. Implementasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Rasika, Lina Agusti. 2019. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lampung Tengah.
- Republik Indonesia 1960. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Sutabri, Tata .2005. *Sistem Informasi Manajemen*. 2005. Jakarta.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*.



Peran Bank Sampah sebagai Lembaga Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Bunga Dwima Sarry¹, Sasmito Jati Utama²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i1.80>

CORRESPONDENCE

E-mail: sasmitomojopahit@gmail.com

KEYWORDS

Garbage Bank, Community Participation, Community Based Waste Management.

ABSTRACT

Services in the waste sector have been regulated through Law Number 18 of 2008 concerning waste management and Minister of Environment and Forestry Regulation 14 of 2021 has regulated community involvement or participation in the Waste Bank institution. This research examines how Community Participation in Waste Management Through Garbage Banks along with supporting and inhibiting factors for community participation in RW 02 Medokan Semampir, Surabaya City. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The focus of this study discusses participation in decision making, participation in implementation, participation in benefits and participation in participation in evaluation. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. This is similar to the facts on the ground which show maturity in community-based waste management carried out by residents so that waste management activities through collection, sorting, weighing, recording and recycling processes are carried out in an innovative, creative, consistent and collective manner that can contribute economically and environmentally for the local community. Factors that encourage community participation in community-based waste management in RW02 Medokan Semampir are the existence of administrators, support from officials and availability of forums. Meanwhile, the factor that inhibits community participation in waste management in RW 02 Medokan Semampir is the legality of the waste bank structure.

PENDAHULUAN

Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan publik dengan bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan

Pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana yang tersedia (Hartanto, 2006).

Pelayanan publik pada hakekatnya adalah amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dipertegas pula pada ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Hal mana salah satu sektor di bidang pelayanan publik di sektor persampahan.

Pelayanan di bidang persampahan telah diatur melalui Undang - Undang Nomer 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan tujuan sebagai regulasi untuk mengatasi persoalan persampahan sebagai akibat pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pasal 4 UU 18/2008 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam UU 18/2008 menegaskan tugas pemerintah dan pemerintah daerah adalah salah satunya menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Problem Timbulan sampah dari sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga cukup kompleks dan memprihatinkan hal mana dapat dilihat dari data mengenai volume timbulan sampah yang terjadi di wilayah perkotaan. Data mengenai volume sampah yang terangkut per hari menurut Provinsi di Indonesia tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021

No	Provinsi	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
1	Aceh	73.640	268.786,55
2	Sumatera Utara	545.93	1.992.639,72
3	Bali	250.818	915.482,47
4	Banten	253.735	926.133,24
5	DKI Jakarta	844.777	3.083.437,85
6	D.I Yogyakarta	86827	316.917,28
7	Sumatra barat	1110.77	405.431,45
8	Riau	911.74	15.043,710
9	Jambi	787.32	287.374,47
10	Sumatera selatan	239.129	872.819,55
11	bengkulu	165.17	60.285,04
12	Lampung	344.766	629.198,79
13	Bangka belitung	413.98	151.100,33
14	Jawa Barat	12.601,65	4.599.600,53

15	Jawa Tengah	14312.07	5.223.906,90
16	Jawa Timur	20.563,82	3.648.239,80
17	Nusa Tenggara Barat	827.17	301.916,64
18	Nusa Tenggara Timur	105.188	82.019,51
19	Kalimantan Barat	108196	394.914,82
20	Kalimantan Tengah	619.69	226.186,56
21	Kalimantan Selatan	2.144,09	248.070,25
22	Kalimantan timur	1,710.20	624.222,53
23	Kalimantan utara	41.81	15.260,25
24	Sulawesi Utara	308.282	435.870,55
25	Sulawesi tengah	222.31	562.612,60
26	Sulawesi Selatan	405.829	1,189.276,08
27	Sulawesi Tenggara	5.573	20.340,57
28	Gorontalo	7.322	26.723,84
29	Sulawesi Barat	25.784	94.114,89
30	Maluku	5.373	19.611,92
31	Maluku Utara	18.882	68.918,97
32	Papua	15.189	55.440,73
	Jumlah	78.620,72	28.696.562,43

Sumber: SIPSN 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa timbulan sampah yang terangkut per hari menurut Provinsi di Indonesia pada tahun 2021 timbulan sampah harian sebanyak 78.620,72/ton, timbulan sampah pertahun sebanyak 28.696.562,43/ton. Provinsi yang paling banyak adalah Jawa timur sebanyak 12.601,65/ton setiap harinya dan sebanyak 3.648.239,80/ton setiap tahunnya.

Sampah rumah tangga diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Adanya penumpukan sampah rumah tangga yang tidak dikelola secara baik dengan cara yang berwawasan lingkungan maka akan menyebabkan timbulnya berbagai dampak, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi kesehatan masyarakat. Data mengenai volume sampah yang terangkut per hari menurut kota di Surabaya tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Kota di Jawa Timur Tahun 2021

No	Provinsi	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
1	Pacitan	533.82	104,654.83
2	Ponorogo	387.78	141,540.58
3	Trenggalek	293.96	107,293.65
4	Blitar	409.93	149,623.83

5	Kediri	844.777	194,845.76
6	Malang	960.59	350,614.62
7	Lumajang	501.50	183,048.96
8	Banyuwangi	1,252.87	457,297.22
9	Sidoarjo	1,114	406,84
10	Jombang	530.37	193,583.44
11	Nganjuk	443.87	162,013.72
12	Bojonegoro	536.50	195,823.81
13	Tuban	503.17	183,655.24
14	Gresik	328.72	119,984.17
15	Pamekasan	276.60	100,957.25
16	Sumenep	367.44	134,116.61
17	Blitar	75.19	27,442.53
18	Mojokerto	66.22	24,168.48
19	Madiun	119.71	43,695.25
20	Batu	114.42	41,762
21	Surabaya	2.222.6	36.373,2

Sumber : SIPSN 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa timbulan sampah menurut kota di Jawa Timur tahun 2021 timbulan sampah di kota Surabaya sebanyak 2.222.6/ton dalam satu hari dan sebanyak 36.373,2/tahun. Walaupun di Surabaya masih banyak imbulan sampah namun kota Surabaya mampu mengelola sampah dengan pola *reuse, reduce, recycle* sampah yang dilakukan dengan melibatkan komunitas lokal.

Kampung Medokan Semampir wilayah RW 02 merupakan salah satu kampung yang terdapat di Kota Surabaya yang memiliki perhatian dan komitmen kuat di dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kampung Medokan Semampir ini memiliki kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam bentuk bank sampah unit yang dikenal dengan bank sampah MASIDOSI. Berdirinya bank sampah di wilayah RW 02 adalah setelah mendapat juara best of the best Merdeka dari Sampah 2013. Bank sampah ini merupakan kelembagaan pengelolaan berbasis masyarakat yang terbentuk dari keikutsertaan warga masyarakat secara melembaga di dalam pengelolaan sampah. Pada tanggal 30 April 2014 bank sampah MASIDOSI berdiri yang mana makna MASIDOSI adalah Rumah Bersih Dompot Terisi. Dalam perjalanannya bank sampah MASIDOSI melaksanakan kerjasama dengan Bank sampah induk Surabaya (BSIS) yang sebelumnya dikenal sebagai bank Sampah Bina Mandiri. Eksistensi bank sampah MASIDOSI mampu mendorong partisipasi warga masyarakat RW 02 Medokan Semampir untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang baik di Kampung Medokan Semampir ini pada kenyataannya berhasil mengubah Kampung medokan semampir yang dulunya kumuh, dan lingkungannya yang kotor sekarang menjadi sebuah kampung yang dikenal sebagai Kampung Wisata Lingkungan. Keberhasilan kampung Medokan Semampir mengubah perilaku masyarakat untuk lebih peduli akan lingkungan juga berhasil menghantarkan Kampung Medokan Semampir mengikuti lomba yaitu lomba merdeka dari sampah, SGC (Surabaya Green n Clean), SSC (Surabaya Smart City), Proklam sampah.

Informasi yang diperoleh penulis dari Ibu Pujiati sebagai Ketua RW 02 mengatakan bahwa kampung Medokan Semampir mendapatkan berbagai piala dan penghargaan yaitu: Surabaya Smart City Juara II 2019, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Juara I 2018, Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK Juara I 2019, Lomba Asuhan Mandiri /Toga Juara 1 2022 dan Lomba Branding Taman Bacaan Masyarakat (TBM) RW 02 Juara 2. Medokan Semampir sebagai kampung terbaik penerapan prosedur kesehatan (Prokes), inovasi kampung Wani tangguh jogo Suroboyo dikombinasikan dengan penerapan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan serta keinginan besar, menjadikan kampung lebih smart untuk kota Surabaya lebih indah. Selain itu Medokan Semampir tahun 2019, berhasil menjadi wilayah kampung wisata lingkungan kedua terbaik, keberhasilan dua wilayah RT yang mewakili sekarang ini dalam Surabaya Smart City 2020, berbuah manis menyabet gelar terbaik sebagai kampung taat prokes.

Bank Sampah MASIDOSI yang dibentuk berdasarkan swadaya dan partisipasi masyarakat kemudian hadir untuk melakukan pendidikan pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi lebih bernilai. Produk yang sudah dibuat adalah berupa baju yang terbuat dari daur ulang biasanya dibuat untuk lomba lingkungan, buat pot, untuk ecobrick (meja, kursi, perabotan, dsb), sabun dari minyak jelantah, pupuk, makanan magot, dan eco enzyme. Partisipasi masyarakat yang tumbuh dari kegiatan bank sampah MASIDOSI merupakan tema yang menarik dikaji oleh penulis, sehingga sebagaimana disampaikan uraian sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Lingkungan RW 02 Medokan Semampir Kota Surabaya.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Studi kasus merupakan bagian jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melangkah lebih jauh ke dalam kasus tertentu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. (Creswell, 2014). Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Partisipasi Masyarakat di Lingkungan RW 02 Medokan Semampir Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) wawancara dengan informan kunci yaitu Ketua RW 02 Medokan Semampir, Ketua RT 02 Medokan Semampir, Ketua Pengurus Bank Sampah MASIDOSI, Warga yang mengikuti kegiatan Bank Sampah dan Warga yang tidak mengikuti kegiatan Bank Sampah. (2) observasi dengan melakukan pengamatan cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah dan mengamati keadaan serta situasi yang terjadi pada Lingkungan RW 02 untuk mendapatkan data yang relevan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. (3) dokumentasi dengan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Uji validitas dilakukan dengan teknik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Alat ukur untuk variabel penelitian

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu :

1. Pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder lainnya sebagai data pendukung dari pelaksanaan observasi, wawancara dan dokumentasi pada penelitian kualitatif.
2. Kondensasi data dengan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan abstraksi data tindakan dari catatan lapangan, wawancara, transkrip, berbagai dokumen, dan catatan lapangan.
3. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif.
4. Penegasan kesimpulan dengan menganalisis menemukan makna data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis temuan dilapangan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di Lingkungan RW 02 Medokan Semampir Kota Surabaya Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di Lingkungan RW 02 Medokan Semampir Kota Surabaya penulis menggunakan 4 (empat) indikator partisipasi masyarakat menurut (Mulyadi, 2011) yaitu :

Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Mulyadi (2011) menyebutkan bahwa partisipasi di dalam pengambilan keputusan menekankan pada keterlibatan warga masyarakat untuk hadir dalam pertemuan, memberikan pendapat dalam pertemuan serta memberikan informasi dalam pertemuan tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan ini mempunyai sub indikator untuk memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di Lingkungan RW 02 yaitu :

Keterlibatan Warga Masyarakat Untuk Hadir Dalam Pertemuan

Sub Indikator pertama pada indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keterlibatan warga masyarakat untuk hadir dalam pertemuan. Sub indikator ini menunjukkan bahwa kehadiran warga masyarakat dalam suatu forum pertemuan merupakan kriteria yang menunjukkan partisipasi di dalam organisasi. Kehadiran warga masyarakat yang meliputi Ketua RW, Ketua RT, Nasabah dan Pengurus Bank Sampah MASIDOSI menunjukkan dinamika aktivitas dalam organisasi Bank Sampah tersebut.

Memberikan Pendapat Dalam Pertemuan

Sub indikator kedua adalah memberikan pendapat dalam pertemuan. Memberikan pendapat ini merupakan bentuk menyumbangkan ide dan pemikiran berkenaan dengan aktivitas organisasi Bank Sampah MASIDOSI di Lingkungan RW 02 Medokan Semampir. Pendapat yang diberikan oleh warga masyarakat akan berkontribusi pada alternatif – alternatif keputusan yang akan di ambil berhubungan dengan dinamika kegiatan dari Bank Sampah MASIDOSI.

Hasil kajian lapangan menunjukkan ada beberapa hal keputusan yang demikian penting berhubungan dengan aktivitas dari Bank Sampah MASIDOSI yang meliputi jadwal pengumpulan sampah, uang hasil penjualan sampah nasabah serta keputusan produk inovasi. Sebagaimana diketahui bahwa jadwal pengumpulan sampah dilakukan setiap 1(satu) bulan sekali hari minggu pada minggu terakhir bulan tersebut. Hal ini tidaklah dapat berjalan apabila belum terdapat kesepakatan serta penyampaian pendapat dari warga masyarakat setempat.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Mulyadi (2011) menyampaikan bahwa partisipasi di dalam pelaksanaan berhubungan dengan kontribusi terhadap tenaga dan dana. Dalam penelitian ini Sub indikator dalam partisipasi pelaksanaan meliputi pelaksanaan dalam hal keterlibatan kepengurusan serta partisipasi dalam mengarahkan sumber daya. Dalam indikator partisipasi dalam pelaksanaan ini mempunyai sub indikator untuk memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di Lingkungan RW 02 yaitu :

Keterlibatan Dalam Kepengurusan

Suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya sangat memerlukan personil atau sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tugas pokok dan fungsi di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu organisasi akan dapat berfungsi dalam melaksanakan misi serta mencapai visinya membutuhkan personil tersebut. Pada konteks organisasi berbasis masyarakat pengurus organisasi adalah sumber daya yang mampu menggerakkan organisasi tersebut mencapai tujuannya. Oleh karena itu keberadaan struktur organisasi menunjukkan kepengurusan terhadap organisasi tersebut.

Partisipasi Dalam Pengerahan Sumber Daya

Partisipasi di dalam pelaksanaan selanjutnya dapat diukur dari sejauh mana warga masyarakat bersedia untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk aktivitas sosial yang dilaksanakan. Pengerahan sumber daya yang dimaksud meliputi : pengerahan tenaga dan dana. Pada penelitian ini dikaji mengenai bagaimanakah partisipasi dalam pengerahan sumber daya dari masyarakat setempat untuk dapat menggerakkan organisasi bank sampah MASIDOSI di dalam pengelolaan persampahan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pengerahan sumber daya yang dilakukan oleh masyarakat relatif lebih besar dalam hal sumber daya tenaga yang diberikan. Hal mana ditunjukkan dengan adanya kegiatan - kegiatan inovatif yang semakin meningkatkan kualitas lingkungan. Beberapa kegiatan inovatif tersebut utamanya adalah kegiatan daur ulang. Kegiatan daur ulang ini dilakukan melalui proses mendaur ulang suatu sampah menjadi produk lain yang lebih berguna.

Partisipasi Dalam Kemanfaatan

Pada indikator ini membahas mengenai partisipasi masyarakat melalui organisasi bank sampah MASIDOSI di dalam memberikan kemanfaatan. Partisipasi dalam kemanfaatan yang dimaksud adalah sejauh mana anggota di dalam organisasi bank sampah MASIDOSI dapat memberikan manfaat bagi lingkungan RW 02 Medokan Semampir.

Hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan organisasi bank sampah MASIDOSI mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan persampahan di lingkungan RW 02 Medokan Semampir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aktivitas pengumpulan, pemilahan, penimbangan dan pencatatan dari kegiatan bank sampah tersebut. Kegiatan bank sampah tersebut di dukung oleh warga setempat yang berperan sebagai nasabah dari bank sampah. Keberadaan pengurus mendorong kegiatan - kegiatan yang dilakukan dari bank sampah efektif dilaksanakan bagi warga sekitar. Partisipasi dalam kemanfaatan dalam penelitian ini dilihat melalui sub indikator guna untuk memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di Lingkungan RW 02 yaitu :

Partisipasi Dalam Kemanfaatan Lingkungan dan Kemanfaatan Ekonomis

Pada sisi kemanfaatan lingkungan produk - produk daur ulang yang dihasilkan menghasilkan memiliki nilai estetika dan juga nilai guna secara lingkungan. Dari sisi estetika diwujudkan dengan pot, hiasan bunga daur ulang yang menghiasi lingkungan kampung tersebut. Kemanfaatan berikutnya adalah secara ekonomis sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa hasil daur ulang sampah dapat memiliki nilai jual yang memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat setempat. Seperti halnya produk pupuk organik cair (POC) yang memiliki pangsa pasar hingga ke luar daerah dengan harga Rp. 15.000 per botol. Hal ini tentunya apabila di kelola secara baik dan profesional sangat mungkin meningkatkan kapasitas produksi dan volume penjualan yang tentunya semakin besar pula pendapatan yang diterima masyarakat.

Partisipasi Pada Keikutsertaan Dalam Melakukan Evaluasi

Mulyadi (2011) menyebutkan bahwa keterlibatan dalam partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi menekankan sejauh mana masyarakat di dalam komunitas bank sampah melakukan penilaian - penilaian dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan peran dari Bank Sampah. Hasil kajian di lapangan menunjukkan proses evaluasi/penilaian yang di lakukan oleh komunitas Bank Sampah MASIDOSI telah di lakukan aktivitas penilaian ini dilakukan terhadap belum optimalnya kegiatan pengelolaan sampah khususnya daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat. Hal yang menyebabkan belum optimalnya kegiatan tersebut adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan daur ulang yang dilaksanakan.

Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh warga masyarakat setiap satu bulan sekali menghasilkan untuk memaksimalkan kegiatan pengelolaan sampah khususnya daur ulang. Kebutuhan sarana pengelolaan sampah tersebut adalah tong untuk pupuk organik cair (POC) dan cetakan sabun. Kebutuhan tong untuk pupuk organik cair merupakan hasil evaluasi atas kegiatan daur ulang yang menghasilkan pupuk organik cair, hanya saja sarana untuk menampung

produksi dari pupuk organik cair tersebut masih belum memadai sehingga berpengaruh terhadap kapasitas produksi dalam pembuatan pupuk organik cair (POC). Informasi yang diperoleh dari kajian lapangan diketahui bahwa pengurus bank sampah MASIDOSI telah mengusulkan penambahan unit tong untuk pembuatan pupuk organik cair, hal ini disampaikan dalam rapat bulanan yang diselenggarakan di Balai RW yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT dan Pengurus Bank Sampah MASIDOSI. Usulan lainnya juga berhubungan dengan kebutuhan pengolahan daur ulang minyak goreng bekas (Jelantah) untuk menjadi sabun cuci tangan. Hal mana usulan yang disampaikan adalah kebutuhan pada cetakan sabun untuk menghasilkan produk yang lebih menarik.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor – faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di lingkungan RW 02 Medokan Semampir adalah keberadaan pengurus, dukungan aparat dan ketersediaan forum. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Lingkungan RW 02 Medokan Semampir adalah Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi terdapat saran dan masukan dari masyarakat berhubungan dengan sarana yang tidak dapat dipenuhi termasuk bantuan dana. Subtansi dari hal tersebut karena legalitas dari struktur bank sampah. Keberadaan pengurus bank sampah yang diisi oleh warga masyarakat setempat keberadaan kurang didukung oleh pengesahan dari aparat pemerintah setempat (kelurahan).

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat di lokasi kajian dapat berjalan dengan cukup baik yang di tunjukkan dengan adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan, pasrtisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam kemanfaatan serta partisipasi keuikutsertaan dalam melakukan evaluasi. Hal ini sebagaimana fakta dilapangan yang menunjukkan adanya kematangan di dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilakukan oleh warga sehingga kegiatan pengelolaan sampah melalui pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pencatatan dan proses melakukan daur ulang dilaksanakan secara inovatif, kreatif, konsisten dan kolektif yang dapat memberikan kontribusi secara ekonomi dan lingkungan bagi warga masyarakat setempat.

Faktor – faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di lingkungan RW 02 Medokan Semampir adalah keberadaan pengurus, dukungan aparat dan ketersediaan forum. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Lingkungan RW 02 Medokan Semampir adalah Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi terdapat saran dan masukan dari masyarakat berhubungan dengan sarana yang tidak dapat dipenuhi termasuk bantuan dana. Subtansi dari hal tersebut karena legalitas dari struktur bank sampah. Keberadaan pengurus bank sampah yang diisi oleh warga masyarakat setempat keberadaan kurang didukung oleh pengesahan dari aparat pemerintah setempat (kelurahan).

REFERENSI

- Al Muchtar, S. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Gelar Pustaka Mandiri.
- Alfiandra. (2009). Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang. UNDIP.
- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, 3(2), 129-139.
- Dimas Prastiyantoro, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Di Dusun Badegan Desa Bantul.
- Estri, P., & Nanang, F. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin Dalam Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Malang. Vol 3(2), 29-40.
- Febrianti, R., & Dkk. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Tanuwijaya, F. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jumarni. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
- Mohamad, R. (2011). Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). Jurnal Smartek, Vol 9
- Mulyadi. (2011). Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Riswan. (2011). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9
- Slamet. (1993). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sri Hardianti. (2019). Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Tambang Kabupaten Tampak.
- Yuliastuti, Ida Ayu Nyoman (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Badung. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. Vol 2(6), 374-393.